



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

LAPORAN KINERJA TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN 2025



SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 sebagai suatu bentuk akuntabilitas atas kinerja program dan kegiatan dapat tersusun. Laporan Kinerja merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran entitas kinerja dalam pengelolaan sumber daya. Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari penyusunan Laporan Kinerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2025 ini bukan sekadar untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden tersebut di atas, namun merupakan bentuk pertanggungjawaban secara terbuka terhadap pencapaian sasaran dan target Tahun Anggaran 2025 dalam Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Tahun 2025-2029 dan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat berguna sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja di tahun-tahun mendatang. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan laporan ini. Kami menyadari laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu mohon kiranya dapat diberikan masukan guna penyempurnaannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Pontianak, Desember 2025

**Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Kalimantan Barat**



Michael Robert, S.T.

EXECUTIVE SUMMARY

A. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mendukung visi Presiden “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045” serta amanat RPJMN 2025–2029, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan sebagai pengampu utama Asta Cita ke-6, yaitu pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, serta turut mendukung Asta Cita ke-3 dan ke-8. Arah kebijakan tersebut diselaraskan ke dalam misi Kementerian periode 2025–2029.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, ditetapkan tujuan strategis Kementerian berupa peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh secara terpadu; serta penguatan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator yang mencakup peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru, peningkatan kualitas, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas, pengembangan hunian vertikal, fasilitasi pembiayaan perumahan terjangkau, penanganan kawasan kumuh, penguatan tata kelola perumahan, serta peningkatan jumlah desa dengan 100% rumah layak huni.

B. ISU STRATEGIS

Pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau merupakan amanat konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, sekaligus menjadi bagian penting dalam pencapaian visi *Indonesia Emas 2045*. Melalui Asta Cita ke-6, pemerintah menegaskan komitmen pembangunan dari desa dan dari bawah untuk mendorong pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, termasuk melalui penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak.

Pada periode perencanaan jangka menengah 2025–2029, tantangan penyediaan perumahan di Provinsi Kalimantan Barat semakin kompleks seiring perubahan demografi, urbanisasi, dan dinamika kebutuhan masyarakat. Pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai institusi tersendiri menandai penguatan fokus pemerintah dalam percepatan pengurangan backlog perumahan dan penanganan rumah tidak layak huni melalui Program Prioritas Nasional Pembangunan 3 Juta Rumah. Dalam

konteks ini, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat berperan strategis sebagai pelaksana kebijakan di tingkat daerah.

Gambar 0-1 Wilayah Kerja Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat



Dokumen Perencanaan Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja selama lima tahun ke depan, dengan mempertimbangkan capaian kinerja periode 2020–2024, kondisi eksisting, potensi daerah, serta permasalahan yang dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah tingginya backlog perumahan yang mencapai 31,29 persen atau sekitar 552.937 KK, yang terdiri dari backlog kepemilikan rumah sebesar 8,06 persen dan backlog rumah tidak layak huni sebesar 23,23 persen. Kondisi ini menunjukkan masih lebarnya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan ketersediaan hunian yang layak, berkualitas, dan terjangkau.

Selain backlog, keterbatasan daya beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), rendahnya kualitas permukiman, berkembangnya kawasan kumuh, serta tekanan urbanisasi di wilayah perkotaan menjadi isu strategis yang memerlukan penanganan terpadu. Tantangan lainnya mencakup kebutuhan pengelolaan hunian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, penguatan inovasi serta integrasi digital dalam penyelenggaraan perumahan, serta peningkatan ketangguhan permukiman terhadap risiko bencana.

Melalui perencanaan yang terarah, terintegrasi, dan adaptif terhadap karakteristik lokal Kalimantan Barat, dokumen ini diharapkan menjadi dasar yang kuat dalam mewujudkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, berkelanjutan, berketahanan, serta berkeadilan, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

C. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dirumuskan berdasarkan 8 sasaran program/kegiatan yang diukur melalui 10 indikator kinerja. Seluruh indikator tersebut telah ditetapkan dan disepakati dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I, sehingga menjadi dasar pengukuran kinerja yang akuntabel dan terarah.

Target kinerja periode 2025–2029 disusun berdasarkan pembagian kewenangan dan penganggaran pada empat kelompok DIPA, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Pembagian ini mencerminkan pendekatan perencanaan yang terintegrasi antara fungsi teknis dan dukungan manajemen dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Barat.

Di bawah Sekretariat Jenderal, Satker PKP memiliki satu sasaran kegiatan yang berfokus pada penyediaan layanan dukungan manajemen, dengan indikator berupa jumlah layanan dukungan manajemen. Hingga tahun 2029, ditetapkan total target sebanyak 13 layanan yang didistribusikan secara bertahap setiap tahunnya.

Pada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, terdapat tiga sasaran kegiatan, yang terdiri dari dua sasaran program teknis perumahan dan kawasan permukiman serta satu sasaran dukungan manajemen. Seluruh sasaran tersebut telah memiliki target kinerja tahunan untuk periode 2025–2029 sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kinerja.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan masing-masing menetapkan lima sasaran kegiatan. Empat sasaran kegiatan berorientasi pada program teknis penyediaan perumahan dan kawasan permukiman, dan satu sasaran kegiatan mendukung fungsi manajemen. Target kinerja untuk kedua direktorat jenderal tersebut dirancang untuk mendukung peningkatan akses hunian layak di wilayah perdesaan maupun perkotaan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, struktur sasaran dan target kinerja Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat periode 2025–2029 menunjukkan komitmen terhadap pencapaian hasil pembangunan yang terukur, selaras dengan kebijakan nasional, serta mendukung efektivitas pelaksanaan Program Prioritas Nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

D. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan kinerja penyerapan yang relatif baik. Total pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp87.715.562.000, dengan realisasi keuangan mencapai Rp78.125.296.025 atau 89,07%, sehingga masih terdapat sisa pagu sebesar Rp9.590.265.975 atau 10,93%. Dari sisi realisasi fisik, capaian mencapai 90,56%, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan kegiatan yang cukup tinggi dan selaras dengan realisasi keuangan.

Gambar 0-2 Realisasi Keuangan Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat



Berdasarkan pembagian DIPA, Sekretariat Jenderal memiliki pagu sebesar Rp617.919.000, dengan realisasi keuangan Rp536.850.044 atau 86,88%, menyisakan pagu Rp81.068.956 atau 13,12%. Seluruh kegiatan di bawah Sekretariat Jenderal telah mencapai realisasi fisik 100%, yang menunjukkan bahwa dukungan manajemen dapat terlaksana secara optimal meskipun masih terdapat sisa anggaran.

Pada DIPA Kawasan Permukiman, pagu anggaran tercatat sebesar Rp41.151.876.000, dengan realisasi keuangan Rp37.066.150.056 atau 90,07%. Sisa pagu yang belum terserap sebesar Rp4.085.725.944 atau 9,93%. Dari sisi fisik, realisasi mencapai 94,02%, mencerminkan pelaksanaan kegiatan penanganan kawasan permukiman yang berjalan dengan baik, meskipun terdapat beberapa kegiatan yang belum sepenuhnya terselesaikan hingga akhir periode pelaporan.

Selanjutnya, pada DIPA Perumahan Perdesaan, dari total pagu Rp40.142.318.000, realisasi keuangan mencapai Rp35.001.304.025 atau 87,19%, dengan sisa pagu sebesar Rp5.141.013.975 atau 12,81%. Realisasi fisik berada pada angka 85,51%, yang

menunjukkan masih terdapat kegiatan fisik yang belum sepenuhnya terealisasi, antara lain dipengaruhi oleh faktor teknis pelaksanaan dan dinamika di lapangan.

Sementara itu, DIPA Perumahan Perkotaan memiliki pagu yang relatif lebih kecil, yaitu Rp5.803.449.000, namun menunjukkan kinerja penyerapan yang sangat baik. Realisasi keuangan mencapai Rp5.520.991.900 atau 95,13%, dengan sisa pagu Rp282.457.100 atau 4,87%. Dari sisi fisik, seluruh kegiatan telah mencapai realisasi 100%, menandakan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perumahan di wilayah perkotaan.

Secara keseluruhan, kinerja anggaran Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan pengelolaan anggaran yang cukup efektif, dengan realisasi keuangan dan fisik yang relatif seimbang. Meskipun masih terdapat sisa pagu dan deviasi fisik pada beberapa DIPA, capaian ini mencerminkan komitmen Satker dalam mendukung pencapaian target pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, berkelanjutan, dan berkeadilan di Provinsi Kalimantan Barat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
EXECUTIVE SUMMARY	ii
A. TUJUAN DAN SASARAN.....	ii
B. ISU STRATEGIS.....	ii
C. CAPAIAN KINERJA	iv
D. REALISASI ANGGARAN	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	i
DAFTAR GAMBAR	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS DAN FUNGSI.....	1
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA	2
D. SARANA DAN PRASARANA.....	4
E. ISU STRATEGIS.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. RENCANA STRATEGIS	10
B. PERJANJIAN KINERJA DAN KRONOLOGI PERUBAHAN	15
C. METODE PENGUKURAN KINERJA.....	18
D. DIPA.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A. UPAYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
B. CAPAIAN KINERJA	25
C. ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA	29
D. ANALISIS REALISASI ANGGARAN.....	32
E. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	33
F. ANALISIS PEMANFAATAN INFORMASI DALAM PELAPORAN KINERJA.....	34
G. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN DAN PENYEBAB KEGAGALAN.....	35
BAB IV PENUTUP.....	38
A. KESIMPULAN	38
B. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT	38

DAFTAR TABEL

Tabel I-1 Daftar Sarana dan Prasarana	4
Tabel II-1 Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis.....	11
Tabel II-2 Sasaran Kegiatan DIPA Sekretariat Jenderal.....	15
Tabel II-3 Sasaran Kegiatan DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	15
Tabel II-4 Sasaran Kegiatan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	16
Tabel II-5 Sasaran Kegiatan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	17
Tabel II-6 Target Kinerja Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat (Sekretariat Jenderal).....	20
Tabel II-7 Target Kinerja Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat (Ditjen Kawasan Permukiman)	21
Tabel II-8 Target Kinerja Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat (Ditjen Perumahan Perdesaan)	21
Tabel II-9 Target Kinerja Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat (Ditjen Perumahan Perkotaan)	22
Tabel II-10 DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025	23
Tabel III-2 Capaian Kinerja Terhadap Target Berdasarkan Sasaran Kegiatan.....	31
Tabel III-1 Capaian Kinerja Terhadap Pagu Anggaran	32



DAFTAR GAMBAR

Gambar 0-1 Wilayah Kerja Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat	iii
Gambar 0-2 Realisasi Keuangan Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat.....	v
Gambar I-1 Diagram SOTK Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat.	2



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen yang digunakan oleh Instansi Pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Sistem tersebut terdiri atas perencanaan yang strategis dan perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, monitoring dan evaluasi kinerja, dan juga pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan program. Dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, serta wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk memperoleh informasi kinerja, diperlukan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik.

Laporan Kinerja tahunan adalah dokumen yang menyajikan evaluasi pencapaian (realisasi) Kinerja terhadap target tahunan suatu instansi atau organisasi, yang disusun berdasarkan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan, dan disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan tahunan. Laporan Kinerja tahunan menjadi bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Dengan adanya Laporan Kinerja ini memuat terkait dengan rencana pelaksanaan dan capaian hasil kegiatan sebagai bentuk tanggung jawab

Laporan Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 yang disampaikan kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I ini merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan melihat capaian kinerja per triwulan dan mengetahui kendala dan permasalahan yang terjadi dan dapat menghambat pelaksanaan kegiatan, serta memberi penyelesaian guna mencapai target yang telah ditentukan secara efektif dan efisien.

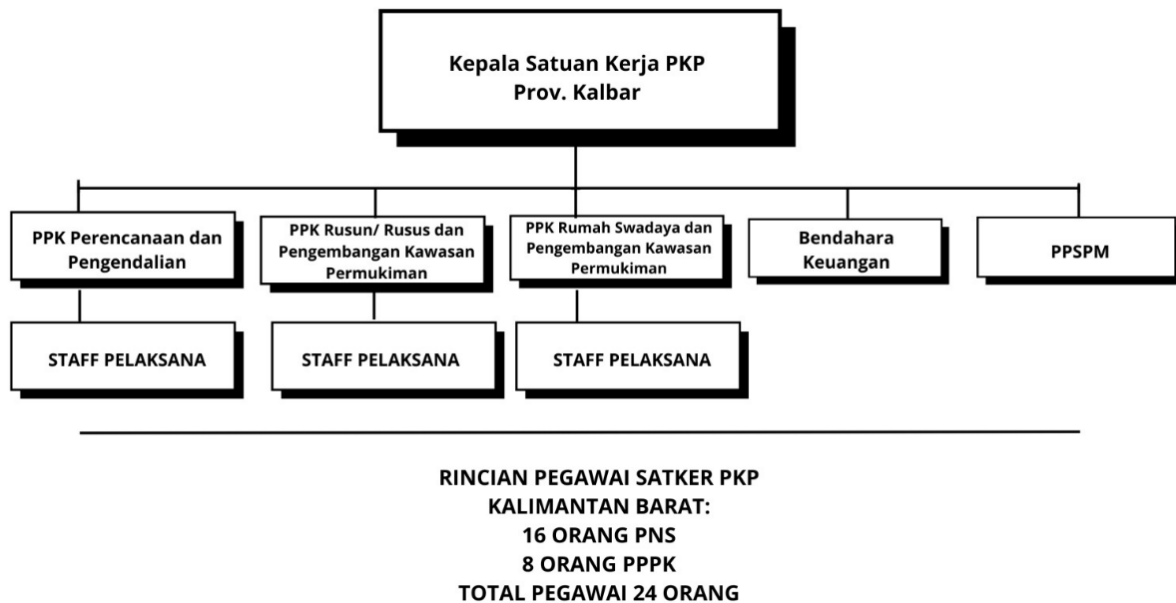
B. TUGAS DAN FUNGSI

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung rumusan target Kementerian PKP yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan Rumah Baru berupa Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus baik di wilayah Kalimantan Barat;
2. Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dan Penyediaan Sanitasi Layak di wilayah Kalimantan Barat;
3. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan pada hunian tapak dan/vertikal di wilayah Kalimantan Barat;

4. Peningkatan kualitas permukiman kumuh di wilayah Kalimantan Barat;
5. Peningkatan sinergi dengan mitra dan pemangku kepentingan, termasuk melalui program CSR dan TJSL, untuk mendukung keberhasilan pencapaian target Tiga Juta Rumah.

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA



Gambar I-1 Diagram SOTK Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat.

Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di wilayah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Kalimantan I yang dipimpin oleh Bapak Arifay Saini, S.T., M.Eng. Secara struktur internal, Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :

1. Kepala Satuan Kerja, Michael Robert, ST.

Bertugas menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana, memberikan supervisi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan, mengawasi penatausahaan dokumen, serta menyusun laporan keuangan dan kinerja.

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Terdapat 3 (tiga) PPK dalam kelembagaan Satker yang dibagi berdasarkan lingkup tugasnya:

- 1) PPK Perencanaan dan Pengendalian, **Michael Robert, S.T.**
- 2) PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, **Nefri Matipa Sampetiku, S.T.**
- 3) PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus, **Gandi Yunansyah, S.T.**

Tugas PPK adalah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, menandatangani kontrak, mengendalikan pelaksanaan kontrak, serta menguji kebenaran tagihan kepada negara.

3. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bayu Andika Putra, S.T., M.T.

Bertugas menguji kebenaran Surat Perintah Pembayaran (SPP) beserta dokumen pendukungnya, membebaskan tagihan pada mata anggaran, dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

4. Bendahara Pengeluaran, Hadriani, S.E.

Bertugas menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga, melakukan pemotongan pajak, serta melakukan pembayaran atas perintah PPK setelah pengujian ketersediaan dana.

5. Unit Pendukung Teknis dan Administrasi

Untuk mendukung kelancaran operasional, struktur Satker dilengkapi dengan petugas fungsional dan pelaksana dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a) Petugas Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAKPA): Membukukan dokumen sumber ke aplikasi sistem akuntansi, melakukan verifikasi dan rekonsiliasi laporan keuangan, serta menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA .
- b) Petugas Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB): Melakukan proses pembukuan, pendaftaran, dan pencatatan Barang Milik Negara (BMN) termasuk inventarisasi dan pelaporan aset .
- c) Kepala Urusan Pelaksanaan dan Teknik: Menyiapkan usulan revisi DIPA, menyusun rencana anggaran biaya (RAB) dan dokumen tender, menyiapkan dokumen kontrak, serta mengumpulkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan .
- d) Kepala Urusan Keuangan: Melakukan koordinasi administrasi umum, penatausahaan kepegawaian, urusan rumah tangga, serta monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran .
- e) Asisten Perencana/Teknik: Melaksanakan koordinasi kegiatan bidang perencanaan teknik, menyusun program pengembangan, dan menyiapkan dokumen lelang .

- f) Petugas E-Monitoring: Mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan (fisik dan keuangan), menginput data ke aplikasi e-Monitoring, serta menyusun laporan progres secara berkala.

D. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana merupakan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan kegiatan di organisasi, instansi, atau perkantoran dalam meningkatkan produktivitas kerja suatu organisasi. Sarana dan prasarana merupakan pendorong untuk meningkatkan kinerja pegawai, agar terorganisir sehingga bisa tercapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan kegiatan yang baik perlu ditunjang fasilitas yang memadai sebagai bagian dari proses meningkatkan kinerja dan mengerjakan seluruh kegiatan dengan tepat. Aset intra komptabel atau aset tetap adalah aset yang digunakan dalam kegiatan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka pencapaian kegiatan. Aset/barang pengguna intra komptabel Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat memiliki rincian sebagai berikut:

Tabel I-1 Daftar Sarana dan Prasarana

Kode UAKPB : 401669
Nama UAKPB : Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat

No.	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Tahun Perolehan	Merk/Type	Satuan	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	16
1	3050104001	Lemari Besi/Metal	3	2021	Lemari Besi 2 Pintu	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
2	3050104001	Lemari Besi/Metal	4	2021	Lemari Besi 2 Pintu	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
3	3050104001	Lemari Besi/Metal	5	2021	Lemari Besi 2 Pintu	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
4	3050104001	Lemari Besi/Metal	6	2022	Brother	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
5	3050104001	Lemari Besi/Metal	7	2022	Brother	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
6	3050104001	Lemari Besi/Metal	8	2022	Brother	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
427	3050104004	Rak Kayu	1	2016	FUJIMA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
428	3050104004	Rak Kayu	3	2016	FUJIMA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
429	3050104004	Rak Kayu	4	2016	FUJIMA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
430	3050104004	Rak Kayu	5	2016	FUJIMA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
431	3050104005	Filing Cabinet Besi	1	2016	FUJIMA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
432	3050104005	Filing Cabinet Besi	2	2016	FUJIMA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
433	3050104005	Filing Cabinet Besi	3	2016	FUJIMA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
434	3050104005	Filing Cabinet Besi	4	2016	FUJIMA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
435	3050104005	Filing Cabinet Besi	5	2016	FUJIMA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
436	3050104007	Brandkas	1	2016	TAX	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
437	3050201002	Meja Kerja Kayu	1	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
438	3050201002	Meja Kerja Kayu	2	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
439	3050201002	Meja Kerja Kayu	3	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
440	3050201002	Meja Kerja Kayu	4	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
441	3050201002	Meja Kerja Kayu	5	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
442	3050201002	Meja Kerja Kayu	6	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
443	3050201002	Meja Kerja Kayu	7	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
444	3050201002	Meja Kerja Kayu	8	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
445	3050201002	Meja Kerja Kayu	9	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
446	3050201002	Meja Kerja Kayu	10	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
447	3050201002	Meja Kerja Kayu	11	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
448	3050201002	Meja Kerja Kayu	12	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
449	3050201002	Meja Kerja Kayu	13	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
450	3050201002	Meja Kerja Kayu	14	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
451	3050201002	Meja Kerja Kayu	16	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
452	3050201002	Meja Kerja Kayu	18	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
453	3050201002	Meja Kerja Kayu	19	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
454	3050201002	Meja Kerja Kayu	20	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
455	3050201002	Meja Kerja Kayu	68	2022	Meja 1/2 Biro	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
456	3050201002	Meja Kerja Kayu	69	2022	Meja 1/2 Biro	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
457	3050201002	Meja Kerja Kayu	70	2022	Meja 1/2 Biro	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
458	3050201002	Meja Kerja Kayu	71	2022	Meja 1/2 Biro	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
459	3050201002	Meja Kerja Kayu	72	2022	Meja 1/2 Biro	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
460	3050201002	Meja Kerja Kayu	73	2022	Meja 1/2 Biro	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
461	3050201002	Meja Kerja Kayu	74	2022	Meja 1/2 Biro	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
462	3050201002	Meja Kerja Kayu	75	2022	Meja 1/2 Biro	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
463	3050201002	Meja Kerja Kayu	76	2022	Meja 1/2 Biro	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
464	3050201002	Meja Kerja Kayu	77	2022	Meja 1/2 Biro	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
465	3050201002	Meja Kerja Kayu	78	2022	Meja 1/2 Biro	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat

466	3050201002	Meja Kerja Kayu	80	2022	Meja Kerja	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
469	3050201003	Kursi Besi/Metal	1	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
470	3050201003	Kursi Besi/Metal	2	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
471	3050201003	Kursi Besi/Metal	3	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
472	3050201003	Kursi Besi/Metal	4	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
473	3050201003	Kursi Besi/Metal	5	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
474	3050201003	Kursi Besi/Metal	6	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
475	3050201003	Kursi Besi/Metal	7	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
476	3050201003	Kursi Besi/Metal	8	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
477	3050201003	Kursi Besi/Metal	9	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
478	3050201003	Kursi Besi/Metal	10	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
479	3050201003	Kursi Besi/Metal	11	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
480	3050201003	Kursi Besi/Metal	12	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
481	3050201003	Kursi Besi/Metal	13	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
482	3050201003	Kursi Besi/Metal	14	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
483	3050201003	Kursi Besi/Metal	15	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
484	3050201003	Kursi Besi/Metal	16	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
485	3050201003	Kursi Besi/Metal	17	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
486	3050201003	Kursi Besi/Metal	18	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
487	3050201003	Kursi Besi/Metal	19	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
488	3050201003	Kursi Besi/Metal	20	2016	FUJITA	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
489	3050201003	Kursi Besi/Metal	24	2020	Kursi Direksi	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1316	3050201033	Sofa	43	2022	Sofa	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1421	3050204004	A.C. Split	216	2021	A.C SPLIT	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1422	3050204004	A.C. Split	217	2021	A.C SPLIT	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1423	3050204004	A.C. Split	221	2021	A.C SPLIT	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1424	3050204004	A.C. Split	222	2022	A.C SPLIT	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1425	3050204004	A.C. Split	223	2022	A.C SPLIT	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1426	3050204004	A.C. Split	224	2022	A.C SPLIT	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1427	3050204004	A.C. Split	225	2022	A.C SPLIT	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1428	3050204004	A.C. Split	225	2022	A.C SPLIT	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1429	3060102061	Lensa Kamera	1	2017	Lensa Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1430	3060102128	Camera Digital	2	2017	—	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1431	3060102128	Camera Digital	3	2021	—	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1432	3060102167	Drone	1	2022	Dj Mavic	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1433	3060102167	Drone	2	2018	—	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1434	3060201004	Telephone Mobile	1	2018	Tab Samsung Galaxy	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1435	3060201016	Facsimile	1	2016	Panasonic KX-FT1981	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1436	3070101173	Bilik Desinfectan	1	2020	Bilik Desinfectan	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1437	3100102001	P.C Unit	1	2016	Asus K31CD-ID002D	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1438	3100102001	P.C Unit	2	2016	Asus K31CD-ID002D	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1439	3100102001	P.C Unit	3	2016	Asus K31CD-ID002D	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1440	3100102001	P.C Unit	4	2016	Asus K31CD-ID002D	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1441	3100102001	P.C Unit	5	2016	Asus K31CD-ID002D	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1442	3100102001	P.C Unit	6	2016	Asus K31CD-ID002D	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1443	3100102001	P.C Unit	7	2016	Asus K31CD-ID002D	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1444	3100102001	P.C Unit	8	2016	Asus K31CD-ID002D	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1445	3100102001	P.C Unit	9	2016	Asus K31CD-ID002D	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1446	3100102001	P.C Unit	10	2016	Asus K31CD-ID002D	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1447	3100102001	P.C Unit	11	2016	Asus K31CD-ID002D	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1448	3100102001	P.C Unit	13	2016	Asus K31CD-ID002D	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1449	3100102001	P.C Unit	14	2016	Asus K31CD-ID002D	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1450	3100102001	P.C Unit	15	2016	Asus K31CD-ID002D	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1451	3100102001	P.C Unit	16	2017	PC Desktop HP envy 750-101D	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1452	3100102001	P.C Unit	18	2021	PC ALL IN ONE (AIO)	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1453	3100102001	P.C Unit	19	2021	PC ALL IN ONE (AIO)	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1454	3100102001	P.C Unit	20	2021	PC ALL IN ONE (AIO)	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1455	3100102001	P.C Unit	21	2022	PC ALL IN ONE (AIO)	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1456	3100102002	Lap Top	1	2016	Asus K401LB-FR0680	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1457	3100102002	Lap Top	2	2016	Asus K401LB-FR0680	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1458	3100102002	Lap Top	3	2016	Asus K401LB-FR0680	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1459	3100102002	Lap Top	4	2016	Asus K401LB-FR0680	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1460	3100102002	Lap Top	5	2016	Asus K401LB-FR0680	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1461	3100102002	Lap Top	6	2017	Asus A456UQ FA073d Gold	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1462	3100102002	Lap Top	9	2020	Notebook Asus A412 FL-EK702T	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1463	3100102002	Lap Top	11	2020	Laptop Asus K413FO-EK502T	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1464	3100102002	Lap Top	12	2020	Laptop Asus K413FO-EK502T	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1465	3100102002	Lap Top	14	2021	Laptop Asus Core i7 UX-482EG-KA551IPS	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1466	3100102002	Lap Top	15	2021	Laptop Asus Core i5 K413FO-EK501TIPS	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1467	3100102002	Lap Top	16	2021	Laptop Asus Core i5 K413FO-EK501TIPS	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1468	3100102002	Lap Top	17	2021	Laptop Asus Core i5 K413FO-EK501TIPS	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1469	3100102002	Lap Top	18	2021	Notebook ACER S 14 SF314	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1470	3100102002	Lap Top	19	2022	Dell Precision 5570-002 Intel Core i9-12900H	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1471	3100102003	Note Book	1	2022	ASUS	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1472	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2016	HP Laser Jet Pro P1102	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1473	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2016	HP Laser Jet Pro P1102	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1474	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	2016	HP Laser Jet Pro P1102	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1475	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	2016	HP Laser Jet Pro P1102	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1476	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	2016	HP Laser Jet Pro P1102	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1477	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	2016	HP Laser Jet Pro P1102	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1478	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9	2016	HP Laser Jet Pro P1102	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1479	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	2016	HP Laser Jet Pro P1102	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1480	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	2016	Epson L365	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1481	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	2016	Epson L365	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1482	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	13	2017	Epson INKJET L805	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1483	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	14	2020	Printer Epson A3 L1300	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1484	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	15	2020	Printer CANON A4 MP287	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1485	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	16	2020	Printer Epson A3 L1300	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1486	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	18	2021	Printer Epson A3 L1300	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1487	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	19	2021	Printer Epson A4 L3110	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1488	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	20	2021	Printer Epson L3110	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1489	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	21	2022	Epson	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1490	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	22	2022	Epson	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1491	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	2021	Scanner Epson DS410	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1492	5031001004	Instalasi Komputer	1	2017	Memory DDR5 4GB PC	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1493	3100203017	External/ Portable Hardisk	1	2017	Harddisk External 2TB Seagate Expansion	Unit	Satker PKP Kalimantan Barat
1554	3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	2	2021	Meja 1/2 BIRO	Buah	Satker PKP Kalimantan Barat
1555	3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	3	2021	Meja 1/2 BIRO	Buah	Satker PKP Kalimantan Barat
1850	3050201003	Kursi Besi/Metal	32	2020	Kursi Rapat	Buah	Satker PKP Kalimantan Barat
1851	3050201003	Kursi Besi/Metal	33	2020	Kursi Rapat	Buah	Satker PKP Kalimantan Barat
1852	3050201003	Kursi Besi/Metal	34	2020	Kursi Rapat	Buah	Satker PKP Kalimantan Barat
1853	3050201003	Kursi Besi/Metal	35	2020	Kursi Rapat	Buah	Satker PKP Kalimantan Barat
1854	3050201003	Kursi Besi/Metal	36	2020	Kursi Rapat	Buah	Satker PKP Kalimantan Barat
1855	3050201003	Kursi Besi/Metal	37	2021	Kursi Rapat	Buah	Satker PKP Kalimantan Barat

1856	3050201003	Kursi Besi/Metal	38	2021	Kursi Rapat	Buah	Satker PKP Kalimantan Barat
1857	3050201003	Kursi Besi/Metal	39	2021	Kursi Rapat	Buah	Satker PKP Kalimantan Barat
1858	3050201003	Kursi Besi/Metal	40	2021	Kursi Rapat	Buah	Satker PKP Kalimantan Barat
1859	3050201003	Kursi Besi/Metal	41	2021	Kursi Rapat	Buah	Satker PKP Kalimantan Barat
1860	3050201003	Kursi Besi/Metal	42	2021	Kursi Rapat	Buah	Satker PKP Kalimantan Barat
1861	3050201003	Kursi Besi/Metal	43	2021	Kursi Rapat	Buah	Satker PKP Kalimantan Barat
1862	3050201003	Kursi Besi/Metal	44	2021	Kursi Rapat	Buah	Satker PKP Kalimantan Barat
1863	3050201003	Kursi Besi/Metal	45	2021	Kursi Rapat	Buah	Satker PKP Kalimantan Barat
1864	3050201003	Kursi Besi/Metal	46	2021	Kursi Rapat	Buah	Satker PKP Kalimantan Barat
1865	3050201003	Kursi Besi/Metal	49	2022	Futura	Buah	Satker PKP Kalimantan Barat
1866	3050201003	Kursi Besi/Metal	50	2022	Futura	Buah	Satker PKP Kalimantan Barat
1867	3050201003	Kursi Besi/Metal	51	2022	Futura	Buah	Satker PKP Kalimantan Barat
1868	3050201003	Kursi Besi/Metal	52	2022	Futura	Buah	Satker PKP Kalimantan Barat
1869	3050201003	Kursi Besi/Metal	53	2022	Futura	Buah	Satker PKP Kalimantan Barat
1870	3050201003	Kursi Besi/Metal	54	2022	Futura	Buah	Satker PKP Kalimantan Barat
1871	3050201003	Kursi Besi/Metal	55	2022	Futura	Buah	Satker PKP Kalimantan Barat
1872	3050201003	Kursi Besi/Metal	56	2022	Futura	Buah	Satker PKP Kalimantan Barat
1873	3050201003	Kursi Besi/Metal	57	2022	Futura	Buah	Satker PKP Kalimantan Barat
1874	3050201003	Kursi Besi/Metal	58	2022	Futura	Buah	Satker PKP Kalimantan Barat
1875	3050201003	Kursi Besi/Metal	59	2022	Futura	Buah	Satker PKP Kalimantan Barat
1876	3050201003	Kursi Besi/Metal	60	2022	Futura	Buah	Satker PKP Kalimantan Barat
1877	3050201003	Kursi Besi/Metal	61	2022	Futura	Buah	Satker PKP Kalimantan Barat
1878	3050201003	Kursi Besi/Metal	62	2022	Futura	Buah	Satker PKP Kalimantan Barat
1879	3050201003	Kursi Besi/Metal	63	2022	Futura	Buah	Satker PKP Kalimantan Barat
2198	3070104108	Kursi Zeis	1	2022	Kursi Direktur	Buah	Satker PKP Kalimantan Barat
2199	3100202017	Speaker Komputer	1	2017	Advance Duo 600	Buah	Satker PKP Kalimantan Barat

E. ISU STRATEGIS

Pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau merupakan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sejalan dengan visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", Pemerintah melalui Asta Cita ke-6 berkomitmen untuk membangun dari desa dan dari bawah guna mewujudkan pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, salah satunya melalui penyediaan infrastruktur dasar dan perumahan.

Memasuki periode perencanaan pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029, tantangan penyediaan perumahan di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, semakin kompleks. Perubahan demografi, urbanisasi, dan dinamika kebutuhan masyarakat menuntut adanya intervensi pemerintah yang lebih responsif dan terukur. Terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai entitas baru yang terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum, menegaskan fokus pemerintah untuk mempercepat penyelesaian backlog perumahan dan penanganan rumah tidak layak huni melalui Program Prioritas Nasional Pembangunan 3 Juta Rumah. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, memegang peranan vital sebagai ujung tombak eksekusi kebijakan tersebut. Dokumen Perencanaan Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja selama lima tahun ke depan. Dokumen ini memuat analisis kondisi umum, potensi, dan permasalahan yang dihadapi, serta merumuskan strategi pencapaian target kinerja yang selaras dengan arah kebijakan nasional maupun karakteristik lokal Kalimantan Barat. Capaian kinerja pada Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan barat pada periode sebelumnya, tahun 2020–2024 dikemukakan pada tabel berikut ini.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, khususnya dalam peningkatan akses terhadap hunian layak, berkelanjutan, dan berketahanan, masih dihadapkan pada sejumlah isu dan permasalahan strategis. Isu-isu tersebut mencakup berbagai aspek sebagaimana diuraikan pada poin-poin berikut:

- **Tingginya Backlog Kepemilikan dan Rumah Tidak Layak Huni**

Berdasarkan data backlog perumahan di Provinsi Kalimantan Barat, tercatat sebanyak 1.767.189 keluarga, dengan backlog kepemilikan rumah sebesar 8,06 persen atau sebanyak 142,399 KK, backlog rumah tidak layak huni (RTLH) sebesar 23,23 persen atau sebanyak 410,538 KK, sehingga secara keseluruhan total backlog perumahan mencapai 31,29 persen atau sebanyak 552.937 KK. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat proporsi yang signifikan dari rumah tangga yang belum memiliki rumah serta masih menempati hunian yang tidak memenuhi standar kelayakan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara kebutuhan masyarakat terhadap perumahan yang layak dengan ketersediaan rumah yang dapat diakses secara memadai, baik dari aspek jumlah, kualitas, maupun keterjangkauan. Oleh karena itu, situasi ini memerlukan intervensi kebijakan yang terarah serta pelaksanaan program perumahan yang berkelanjutan dan terintegrasi, guna menurunkan backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat

- **Keterbatasan Daya Beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah**

Keterbatasan kemampuan ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merupakan salah satu hambatan utama dalam memperoleh akses kepemilikan rumah, karena sebagian besar MBR tidak memiliki daya beli yang cukup untuk membayar biaya pembelian atau cicilan rumah secara langsung, sehingga banyak dari mereka yang terhambat dalam proses kepemilikan rumah sendiri. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya penghasilan kelompok MBR yang sering kali tidak mampu memenuhi kriteria pembiayaan perumahan formal, ditambah dengan akses terhadap lembaga keuangan yang masih terbatas dan kurangnya skema pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka.

- **Kualitas Permukiman dan Penanganan Kumuh.**

Kualitas permukiman masih menjadi tantangan dalam pembangunan perumahan, terutama di kawasan padat penduduk yang berkembang secara tidak terencana dan memiliki keterbatasan infrastruktur dasar. Kondisi tersebut ditandai oleh rumah tidak layak huni, akses air bersih dan sanitasi yang terbatas, serta buruknya pengelolaan lingkungan, yang memicu munculnya kawasan kumuh dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penanganan kawasan kumuh perlu dilakukan secara

terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas fisik permukiman, penyediaan infrastruktur dasar, serta pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan lingkungan hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan.

- **Dinamika Urbanisasi dan Kompleksitas Pembangunan Perkotaan**

Percepatan arus urbanisasi yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir telah mendorong terjadinya konsentrasi penduduk secara signifikan di kota-kota besar. Kondisi ini menimbulkan tekanan yang semakin besar terhadap kapasitas perkotaan, khususnya dalam penyediaan hunian yang layak, akses air bersih, layanan sanitasi yang memadai. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah penduduk dan ketersediaan infrastruktur perkotaan berpotensi memicu berbagai permasalahan sosial, lingkungan, dan ekonomi apabila tidak dikelola secara terencana dan berkelanjutan.

- **Pengelolaan Hunian Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.**

Pengelolaan hunian berkelanjutan dan ramah lingkungan menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta tekanan terhadap sumber daya alam. Konsep ini menekankan pada perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan kawasan hunian yang memperhatikan efisiensi penggunaan lahan, energi, dan air, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Penerapan prinsip bangunan hijau, pengelolaan limbah yang terpadu, pemanfaatan energi terbarukan, serta penyediaan ruang terbuka hijau merupakan bagian integral dalam mewujudkan lingkungan hunian yang sehat dan berdaya dukung tinggi. Selain itu, pengelolaan hunian yang berkelanjutan juga perlu didukung oleh peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan, sehingga kawasan permukiman tidak hanya layak huni pada saat ini, tetapi juga tetap terjaga bagi generasi mendatang.

- **Inovasi dan Integrasi Digital dalam Penyelenggaraan Perumahan**

Inovasi dan integrasi digital dalam penyelenggaraan perumahan berperan penting dalam meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan perumahan. Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi digital mendukung pengelolaan data yang terintegrasi, pengambilan keputusan berbasis data, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, digitalisasi memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar program perumahan lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

- Penguatan Ketangguhan Permukiman terhadap Risiko Bencana

Penguatan ketangguhan permukiman terhadap risiko bencana menjadi penting dalam pembangunan perumahan, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi seperti banjir, kebakaran, dan bencana hidrometeorologi lainnya. Upaya ini dilakukan melalui perencanaan berbasis risiko, penerapan standar bangunan yang aman, serta penyediaan infrastruktur yang tangguh. Selain itu, peningkatan kapasitas masyarakat dan koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat kesiapsiagaan, mengurangi dampak bencana, dan mendukung keberlanjutan permukiman.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sasaran Program merupakan kondisi yang diharapkan dapat dicapai oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat sebagai suatu *outcome* dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, mengacu pada Sasaran Strategis yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu:

1. Sasaran strategis (SS) 1, yaitu “Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan”, dengan indikator kinerja sasaran strategisnya sebagai berikut:
 - a. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi.;
 - b. Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu.;
 - c. Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; dan
 - d. Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni.
2. Sasaran strategis (SS) 2, yaitu “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman”, dengan indikator kinerja sasaran strategisnya sebagai berikut :
 - a. Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. Indeks Integritas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan;
 - c. Tingkat Kualitas Pengawasan Intern.

Sasaran strategis ini akan diturunkan menjadi 6 Sasaran Program yang menjadi tanggung jawab masing-masing Unit Organisasi di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu:

1. Meningkatkan hunian layak di Kawasan permukiman (Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman);
2. Meningkatkan Penanganan Permukiman Kumuh (Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman);
3. Meningkatkan Ekosistem Perumahan dan Permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak (Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman);
4. Meningkatkan hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan (Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan);
5. Meningkatkan Hunian layak dan terjangkau di wilayah perkotaan (Direktorat Jenderal Perkotaan);

6. Meningkatnya tata Kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman (Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko); dan
7. Meningkatnya Dukungan Manajemen (Unit Organisasi).

Mengacu pada sasaran strategis Unit Organisasi di atas, maka Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat memiliki 4 (empat) Sasaran Kegiatan yang akan dijabarkan Indikator Kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan yaitu:

1. Sasaran Kegiatan (SK) 1, yaitu Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Tingkat layanan dukungan manajemen
2. Sasaran Kegiatan (SK) 2, yaitu Terlaksananya Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman
 - b. Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - c. Jumlah Unit Rumah yang Ditingkatkan Kualitasnya di Pesisir
 - d. Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh.
3. Sasaran Kinerja (SK) 3, yaitu Terlaksananya Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan
 - b. Jumlah Unit Komponen Rumah untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan
 - c. Jumlah Unit Rumah Swadaya yang Ditingkatkan Kualitasnya di Perdesaan
4. Sasaran Kinerja (SK) 4, yaitu Terlaksananya Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Jumlah unit rumah susun yang terbangun di perkotaan
 - b. Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan
 - c. Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perkotaan

Tabel II-1 Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan	Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan	a. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan	Meningkatnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis
Emas 2045	ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata Kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel dan berintegritas secara kolaboratif;	baru. b. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas . c. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas. d. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu. e. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal. f. Persentase	yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis
			peningkatan rumah layak huni melalui fasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau. g. Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu. h. Persentase terwujudnya tata Kelola hunian publik, privat, dan perlindungan konsumen. i. Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni j. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi	
		Peningkatan kualitas tata kelola	Persentase peningkatan tata	Meningkatnya kualitas tata

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis
		dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kelola dan pengawasan internal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	kelola dan pengawasan intern Perumahan dan Kawasan Permukiman

Arah kebijakan dan strategi pada tingkat Unit Organisasi (Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman) difokuskan pada penataan organisasi untuk mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi teknis operasional. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024, kebijakan ini bertujuan untuk memisahkan dan mengkhususkan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Strategi utama unit organisasi induk meliputi:

- Pemandirian Organisasi: Membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bersifat mandiri untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang tertentu.
- Pembinaan Terintegrasi: Sekretaris Jenderal dan Direktorat Jenderal terkait memberikan pembinaan teknis, administrasi, dan tata kelola risiko kepada UPT.
- Koordinasi Lintas Sektor: Mengedepankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di dalam internal UPT maupun antar instansi pemerintah pusat dan daerah

Arah kebijakan dan strategi Satuan Kerja Provinsi Kalimantan Barat disusun sebagai penjabaran operasional dari arah kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029, dengan fokus utama pada percepatan penyediaan hunian layak yang terjangkau, aman, dan berkelanjutan. Strategi ini dirumuskan untuk menjawab tantangan spesifik kewilayahan, khususnya dalam menangani angka backlog kelayakan penghunian di Kalimantan Barat yang mencapai 410,538 ribu Kepala Keluarga.

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung rumusan target Kementerian PKP yaitu sebagai berikut:

- Pembangunan Rumah Baru berupa Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus baik di wilayah Kalimantan Barat;
- Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dan Penyediaan Sanitasi Layak di wilayah Kalimantan Barat;

- c) Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan pada hunian tapak dan/vertikal di wilayah Kalimantan Barat;
- d) Peningkatan kualitas permukiman kumuh di wilayah Kalimantan Barat;
- e) Peningkatan sinergi dengan mitra dan pemangku kepentingan, termasuk melalui program CSR dan TJSL, untuk mendukung keberhasilan pencapaian target Tiga Juta Rumah.

B. PERJANJIAN KINERJA DAN KRONOLOGI PERUBAHAN

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian kinerja disusun dengan mencantumkan sasaran, indikator kinerja, target kinerja, dan anggaran. Rincian perjanjian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretariat Jenderal ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2025 dengan target sesuai dengan DIPA Nomor: **SP DIPA- 146.01.1.691410/2025**

Tabel II-2 Sasaran Kegiatan DIPA Sekretariat Jenderal

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal	1 Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	1 layanan

KEGIATAN	PAGU APBN
1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	Rp 455,119,000.00

Kemudian terdapat revisi Perjanjian Kinerja yang disahkan pada tanggal 17 November 2025 sebagai akibat dari perubahan anggaran pagu dari Rp455.119.000 menjadi Rp617.919.000

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal	1 Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	1 layanan

KEGIATAN	PAGU APBN
1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	Rp 617,919,000.00

2. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 2025 dengan target sesuai dengan DIPA Nomor: **SP DIPA- 146.03.1.691464/2025**

Tabel II-3 Sasaran Kegiatan DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan
		2. Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1282 Unit
2	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	1. Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh	19,92 Hektar

KEGIATAN

1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

PAGU APBN

Rp 41,516,770,000.00

Kemudian terdapat revisi Perjanjian Kinerja yang disahkan pada tanggal 31 Oktober 2025 sebagai akibat dari perubahan anggaran pagu dari Rp41.516.770.000 menjadi Rp41.151.876.000, serta perubahan target jumlah rumah swadaya yang dibangun dari 1.282 unit menjadi 1.279 unit.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan
		2. Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1279 Unit
2	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	1. Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh	19,92 Hektar

KEGIATAN

1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

PAGU APBN

Rp 41,151,876,000.00

3. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan ditandatangani pada tanggal 01 Agustus 2025 dengan target sesuai dengan DIPA Nomor: **SP DIPA-146.05.1.691572/2025**

Tabel II-4 Sasaran Kegiatan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 laporan
2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	2. Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	1 Unit

KEGIATAN

1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

PAGU APBN

Rp 105,520,000.00

Kemudian terdapat revisi Perjanjian Kinerja yang disahkan pada tanggal 11 Agustus 2025 sebagai akibat dari perubahan anggaran pagu dari Rp105.520.000 menjadi Rp527.499.000

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 laporan
2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	2 Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	1 Unit

KEGIATAN

1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

PAGU APBN

Rp 527,499,000.00

Pada tanggal 26 Agustus 2025 direvisi kembali sebagai akibat dari perubahan anggaran pagu dari Rp527.499.000 menjadi Rp5.783.248.000, serta perubahan target jumlah rumah swadaya yang dibangun dari 1 unit menjadi 241 unit.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 laporan
2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	2 Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	241 Unit

KEGIATAN

1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

PAGU APBN

Rp 5,783,248,000.00

Pada tanggal 31 Oktober 2025 direvisi kembali sebagai akibat dari perubahan anggaran pagu dari Rp5.783.248.000 menjadi Rp5.803.449.000, serta perubahan target jumlah rumah swadaya yang dibangun dari 241 unit menjadi 242 unit.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 laporan
2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	2 Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	242 Unit

KEGIATAN

1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

PAGU APBN

Rp 5,803,449,000.00

4. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan ditandatangani pada tanggal 01 Agustus 2025 dengan target sesuai dengan DIPA Nomor: **SP DIPA-146.04.1.691518/2025**

Tabel II-5 Sasaran Kegiatan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	1	Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	1 unit
2	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 laporan

KEGIATAN

1 **Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat**

PAGU APBN

Rp 8,444,525,000.00

Kemudian terdapat revisi Perjanjian Kinerja yang disahkan pada tanggal 22 Agustus 2025 sebagai akibat dari perubahan anggaran pagu dari Rp8.444.525.000 menjadi Rp42.197.008.000 dan target bantuan rumah swadaya sebanyak 1.578 unit.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	1	Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	1 unit
2	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 laporan
3	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	3	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	1578 unit

KEGIATAN

1 **Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat**

PAGU APBN

Rp 42,197,008,000.00

Pada tanggal 27 Oktober 2025 direvisi kembali sebagai akibat dari perubahan anggaran pagu dari Rp42.197.008.000 menjadi Rp Rp40.142.318.000, serta perubahan target jumlah bantuan rumah swadaya dari 1.578 unit menjadi 1.575 unit.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	1	Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	1 unit
2	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 laporan
3	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 laporan
		4	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	1575 unit

KEGIATAN

1 **Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat**

PAGU APBN

Rp 40,142,318,000.00

C. METODE PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja Satuan Kerja dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pengukuran ini dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan akuntabel dengan mengacu pada

Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis, serta Rencana Kerja Tahunan yang telah disusun sebelumnya.

Tingkat capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja. Perhitungan capaian dilakukan menggunakan formula perbandingan antara realisasi terhadap target yang kemudian dikonversikan dalam bentuk persentase. Hasil pengukuran ini digunakan untuk menentukan kategori kinerja, baik sangat baik, baik, cukup, kurang, maupun sangat kurang, sesuai dengan pedoman yang berlaku.

$$\text{Capaian Kinerja} = (\text{Target/Realisasi}) \times 100\%$$

Data realisasi kinerja diperoleh dari berbagai sumber resmi, antara lain laporan pelaksanaan kegiatan, dokumen kontrak, berita acara serah terima pekerjaan, laporan pengawasan, serta sistem informasi yang dikelola pemerintah. Seluruh data tersebut diverifikasi untuk menjamin keakuratan, keandalan, dan keterlacakan informasi yang digunakan dalam proses pengukuran.

Selain pengukuran secara kuantitatif, dilakukan pula analisis kualitatif untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi capaian kinerja, baik yang bersifat pendukung maupun penghambat. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap hasil yang dicapai, serta sebagai dasar dalam merumuskan strategi perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Dengan penerapan metode pengukuran kinerja ini, Satuan Kerja diharapkan mampu menyajikan informasi kinerja yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menjadi instrumen evaluasi dalam mendukung pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Target Kinerja 2025-2029 pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dibagi menjadi 4 (empat) berdasarkan jumlah DIPA, yaitu meliputi Sekretariat Jenderal, Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan. Berikut ini Gambaran mengenai target kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat :

1. Target Kinerja di bawah Sekretariat Jenderal

Kegiatan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat di bawah Sekretariat Jenderal memiliki 1 (satu) Sasaran Kegiatan dengan indikator berupa Jumlah Layanan Dukungan Manajemen. Total jumlah target yang

ditetapkan hingga 2029 yaitu sejumlah 13 target jumlah layanan dengan jumlah target setiap tahunnya yang dapat dilihat pada Tabel II-6.

Tabel II-6 Target Kinerja Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat (Sekretariat Jenderal)

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
PROGRAM : Program Dukungan Manajemen								
KEGIATAN : Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal								
1	SASARAN KEGIATAN : Meningkatkan dukungan manajemen Sekretariat Jenderal							
1	IKK : Jumlah Layanan Dukungan Manajemen	Layanan	1	3	3	3	3	13

2. Target Kinerja di bawah Ditjen Kawasan Permukiman

Kegiatan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat yang berada di bawah Ditjen Kawasan Permukiman memiliki 3 (tiga) Sasaran Kegiatan. Dua sasaran kegiatan merupakan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, sedangkan satu sasaran kegiatan merupakan Program Dukungan Manajemen. Masing-masing sasaran kegiatan telah ditetapkan target 2025-2029 yang dapat dilihat pada Tabel II-7.

Tabel II-7 Target Kinerja Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat (Ditjen Kawasan Permukiman)

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
PROGRAM : Program Perumahan dan Kawasan Permukiman								
KEGIATAN : Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman								
1	SASARAN KEGIATAN : Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman							
1.1	IKK : Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	1	1	1	1	1	5
1.2	IKK : Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Unit	1,279	-	-	-	-	1,279
1.3	IKK : Jumlah Rumah Khusus	Unit	-	242	242	242	242	968
1.4	IKK : Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan	Unit	-	3,421	2,204	2,204	2,204	10,033
2	SASARAN KEGIATAN : Meningkatkan luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu							
2.1	IKK : Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	20	68	68	66	66	288
PROGRAM : Dukungan Manajemen								
KEGIATAN : Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman								
3	SASARAN KEGIATAN : Meningkatkan dukungan manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman							
3.1	IKK : Jumlah Layanan Dukungan Manajemen	Layanan	-	1	1	1	1	4

3. Target Kinerja di bawah Ditjen Perumahan Perdesaan

Kegiatan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat yang berada di bawah Ditjen Perumahan Perdesaan memiliki 5 (lima) Sasaran Kegiatan. Empat sasaran kegiatan merupakan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, sedangkan satu sasaran kegiatan merupakan Program Dukungan Manajemen. Masing-masing sasaran kegiatan telah ditetapkan target 2025-2029 yang dapat dilihat pada Tabel II-8.

Tabel II-8 Target Kinerja Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat (Ditjen Perumahan Perdesaan)

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
PROGRAM : Program Perumahan dan Kawasan Permukiman								
KEGIATAN : Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan								
1	SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan							
	1.1 IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	1	1	1	1	1	5
2	SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perdesaan							
	2.1 IKK : Jumlah Unit Perumahan Tapak yang Mendapat Bantuan PSU di Wilayah Perdesaan	Unit	-	150	150	150	150	600
	2.2 IKK : Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	Unit	-	242	242	242	242	968
	2.3 IKK : Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perdesaan	Unit	-	-	-	-	-	-
	2.4 IKK : Jumlah Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perdesaan	Unit	-	-	43	43	43	129
3	SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perdesaan							
	3.1 IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan	1	1	1	1	1	5
	3.2 IKK : Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	Unit	1,575	-	-	-	-	1,575
	3.3 IKK : Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	Unit	-	3,237	2,188	2,188	2,188	9,801
4	SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu di Wilayah Perdesaan							
	4.1 IKK : Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh di Kawasan Perdesaan	Hektar	-	68	68	66	66	268
PROGRAM : Dukungan Manajemen								
KEGIATAN : Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan								
5	SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya dukungan manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan							
	5.1 IKK : Jumlah Layanan Dukungan Manajemen	Layanan	-	1	1	1	1	4

4. Target Kinerja di bawah Ditjen Perumahan Perkotaan

Kegiatan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat yang berada di bawah Ditjen Perumahan Perkotaan memiliki 5 (lima) Sasaran Kegiatan. Empat sasaran kegiatan merupakan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, sedangkan satu sasaran kegiatan merupakan Program Dukungan Manajemen. Masing-masing sasaran kegiatan telah ditetapkan target 2025-2029 yang dapat dilihat pada Tabel II-9.

Tabel II-9 Target Kinerja Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat (Ditjen Perumahan Perkotaan)

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					TOTAL
			2025	2026	2027	2028	2029	
PROGRAM : Program Perumahan dan Kawasan Permukiman								
KEGIATAN : Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan								
1	SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan							
1.1	IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan	Laporan	1	1	1	1	1	5
2	SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan							
2.1	IKK : Jumlah Unit Perumahan Tapak Perkotaan yang Mendapat Bantuan PSU	Unit	-	150	150	150	150	600
2.2	IKK : Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perkotaan	Unit	-	323	323	323	323	1,292
2.3	IKK : Jumlah Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perkotaan	Unit	-	-	43	-	-	43
2.4	IKK : Jumlah Rumah Susun Hunian Perkotaan	Unit	-	-	43	43	43	129
2.5	IKK : Jumlah Rumah Susun Perkotaan yang Mendapat Bantuan PSU	Unit	-	-	43	43	43	129
3	SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan							
3.1	IKK : Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	Unit	242	4,211	2,188	2,188	2,188	11,017
4	SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu di Wilayah Perkotaan							
4.1	IKK : Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	Hektar	-	68	68	66	66	268
PROGRAM : Dukungan Manajemen								
KEGIATAN : Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan								
5	SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan							
5.1	IKK : Jumlah Layanan Dukungan Manajemen	Layanan	-	1	1	1	1	4

D. DIPA

DIPA Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 4 (empat) berdasarkan Unit Organisasinya, yaitu Sekretariat Jenderal, Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, serta Ditjen Perumahan Perkotaan.

Tabel II-10 DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025

A	Unit Organisasi : SEKRETARIAT JENDERAL	
	SP DIPA- 146.01.1.691410/2025	
	DIPA Awal Tanggal : 02 Desember 2024	Rp 66.119.000
	Revisi ke-1 DIPA Tanggal : 11 Juni 2025	Rp 455.119.000
	Revisi ke-2 DIPA Tanggal : 14 Juli 2025	Rp 455.119.000
B	Unit Organisasi : DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN	
	SP DIPA- 146.03.1.691464/2025	
	DIPA Awal Tanggal : 02 Desember 2024	Rp 7.194.000.000
	Revisi ke-1 DIPA Tanggal : 21 Mei 2025	Rp 20.000.000
	Revisi ke-2 DIPA Tanggal : 25 Juni 2025	Rp 100.594.000
	Revisi ke-3 DIPA Tanggal : 15 Agustus 2025	Rp 41.516.770.000
C	Unit Organisasi : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN	
	SP DIPA- 146.05.1.691572/2025	
	DIPA Awal Tanggal : 02 Desember 2024	Rp 5.615.645.000
	Revisi ke-1 DIPA Tanggal : 21 Mei 2025	Rp 20.000.000
	Revisi ke-2 DIPA Tanggal : 03 Juli 2025	Rp 105.520.000
	Revisi ke-3 DIPA Tanggal : 14 Juli 2025	Rp 105.520.000

	Revisi ke-4 DIPA Tanggal : 09 Agustus 2025	Rp 527.499.000
	Revisi ke-5 DIPA Tanggal : 25 Agustus 2025	Rp 5.783.248.000
D	Unit Organisasi : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN	
	SP DIPA- 146.04.1.691518/2025	
	DIPA Awal Tanggal : 02 Desember 2024	Rp 21.289.986.000
	Revisi ke-1 DIPA Tanggal : 20 Mei 2025	Rp 8.359.959.000
	Revisi ke-2 DIPA Tanggal : 03 Juli 2025	Rp 8.444.525.000
	Revisi ke-3 DIPA Tanggal : 14 Juli 2025	Rp 8.444.525.000
	Revisi ke-4 DIPA Tanggal : 21 Agustus 2025	Rp 42.197.008.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

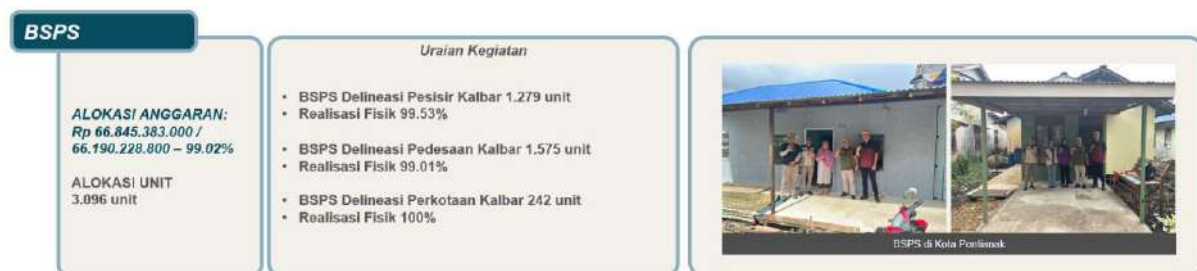
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. UPAYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

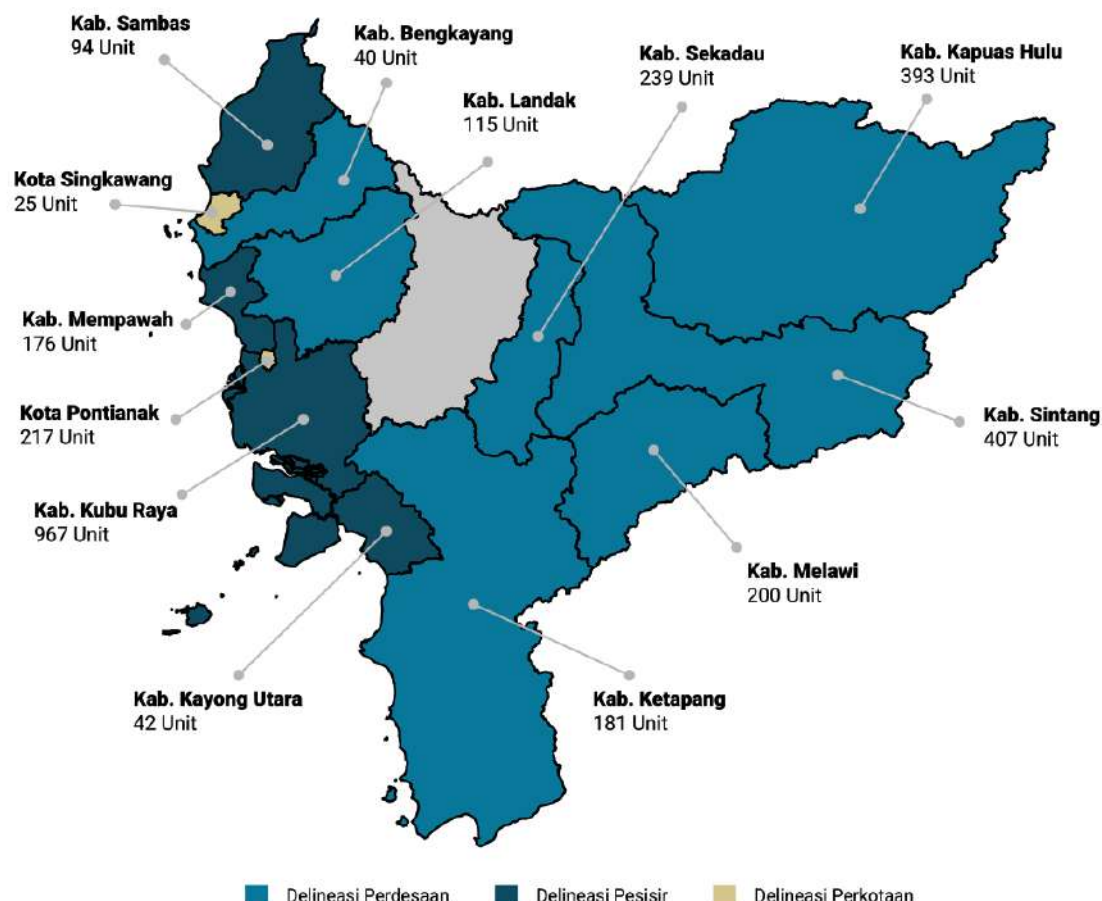
Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu unit kerja atau pimpinan suatu organisasi dalam mempertanggungjawabkan dan menjelaskan capaian kinerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan program, tujuan dan sasaran yang telah direncanakan dalam kurun waktu satu tahun yaitu selama periode tahun anggaran 2025. Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat selaku unit kerja eselon IV disampaikan ke unit organisasi eselon III yaitu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan 1 dan juga disampaikan ke Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman menjadi Laporan Kinerja Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025.

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 ini terdiri dari 8 Sasaran Program/Kegiatan yang didukung dalam 10 Indikator Kinerja. Indikator Kinerja tersebut sesuai dengan yang telah diperjanjikan Kepala Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan 1.



Program BSPS di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp66.845.383.000, dengan realisasi Rp66.190.228.800 atau 99,02%, mencakup total 3.096 unit. Pelaksanaan kegiatan tersebar pada tiga wilayah delineasi, yaitu pesisir sebanyak 1.279 unit dengan realisasi fisik 99,53%, perdesaan sebanyak 1.575 unit dengan realisasi fisik 99,01%, serta perkotaan sebanyak 242 unit dengan realisasi fisik 100%. Capaian tersebut menunjukkan tingkat penyerapan dan realisasi fisik yang sangat baik dalam mendukung peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.



PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM BSPS

3096
Unit

DELINEASI	UNIT	PAGU	REALISASI KEUANGAN	
			RP	%
Pesisir	1279	Rp 27,886,316,000	Rp 27,505,639,550	98.63%
Perdesaan	1575	Rp 33,663,117,000	Rp 33,598,149,500	99.81%
Perkotaan	242	Rp 5,295,950,000	Rp 5,264,279,600	99.40%
TOTAL	3096	Rp 66,845,383,000	Rp 66,190,228,800	99.29%

BANTUAN RUMAH SUSUN

ALOKASI ANGGARAN:
Rp 6.266.434.000 /
Realisasi (Rp)
1.132.025.875 (18.06%)

ALOKASI UNIT
32 unit / 1 Tower
Rusun SMA Panca Setya
Kalimantan Barat

Uraian Kegiatan

Rusun SMA Panca Setya Kalimantan Barat

Progress Rencana : 1,810%
Progress Realisasi : 10.390%
Deviasi : 8,850%

Kegiatan Rusun Panca Setya baru mulai berkontrak di Bulan Desember 2025, dan anggarannya diperkirakan tidak terserap sebesar Rp 4,705,560,000 (75,70%).



Pelaksanaan Pengerjaan

Bantuan Rumah Susun dialokasikan sebesar Rp6.266.434.000, dengan realisasi Rp1.132.025.875 atau 18,06%, untuk pembangunan 1 unit rumah susun berupa 1 tower di SMA Panca Setya, Kalimantan Barat. Progres fisik menunjukkan realisasi 10,39% dari rencana 1,81%, dengan deviasi positif sebesar 8,85%. Kegiatan pembangunan baru mulai berkontrak pada Desember 2025, sehingga diperkirakan terdapat anggaran yang tidak terserap sebesar Rp4.705.560.000 atau sekitar 75,70% dari pagu.

Gambar III-1 Program Pembangunan Rumah Susun



BANTUAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH

Uraian Kegiatan

**ALOKASI ANGGARAN
PENANGANAN
KAWASAN KUMUH:**
Rp10.088.561.000 /
Realisasi (Rp)
7.820.352.283 (77,52%)

Prov Kalbar / 19,92 Ha

- Rencana : 100%
- Realisasi : 75,59%
- Deviasi : -24,42%
- Harga kontrak hasil tender adalah Rp7.339.776.247, sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.834.409.753 dibandingkan dengan pagu awal.



Pemasangan Udlich



Pekerjaan Paving

Bantuan Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.088.561.000, dengan realisasi mencapai Rp7.820.352.283

atau 77,52% dari pagu, mencakup luas penanganan $\pm 19,92$ hektare. Kegiatan penanganan kawasan kumuh difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan, antara lain melalui pemasangan u-ditch/drainase dan pekerjaan paving, yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas, sistem drainase, serta kualitas lingkungan permukiman secara keseluruhan.

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan capaian fisik dengan realisasi 75,59% dari rencana 100%, sehingga terdapat deviasi sebesar -24,42%. Berdasarkan hasil tender, nilai kontrak yang ditetapkan sebesar Rp7.339.776.247, menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp1.834.409.753 dibandingkan pagu awal.

Gambar III-2 Program Bantuan Penanganan Kawasan Kumuh



BANTUAN SANITASI

Uraian Kegiatan

**ALOKASI ANGGARAN
PENANGANAN SANITASI:**
Rp3.056.920.000 /
Realisasi Rp
1.562.888.841 (51.13%)
Prov Kalbar,
Kab Kubu Raya / 116 Unit

Progress Fisik Pelaksanaan
Rencana : 100%
Realisasi : 100%



Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Program Bantuan Sanitasi di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kubu Raya, dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.056.920.000. Hingga pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran mencapai Rp1.562.888.841 atau 51,13% dari pagu, dengan jumlah penanganan sebanyak 116 unit.

Dari sisi fisik, pelaksanaan kegiatan telah mencapai 100%, sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Program ini difokuskan pada penyediaan sarana sanitasi layak bagi masyarakat, guna meningkatkan akses terhadap fasilitas sanitasi yang sehat, aman, dan memenuhi standar lingkungan. Penyelesaian kegiatan secara penuh diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat di wilayah sasaran.

Gambar III-3 Program Bantuan Sanitasi



C. ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA

Seluruh indikator kinerja yang ditetapkan pada masing-masing unit organisasi telah mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja hingga Triwulan IV. Hal ini mencerminkan konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan, serta efektivitas perencanaan dan pengendalian kinerja dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Pada Unit Organisasi Sekretariat Jenderal, program yang dilaksanakan adalah Dukungan Manajemen dengan sasaran kegiatan berupa meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal. Indikator yang digunakan adalah tingkat layanan dukungan manajemen, dengan target awal sebanyak 1 layanan dan capaian hingga Triwulan IV juga sebesar 1 layanan, yang menunjukkan bahwa target telah tercapai sepenuhnya.

Pada Unit Organisasi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, program yang dijalankan adalah Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sasaran kegiatan pertama adalah meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di kawasan permukiman. Indikatornya

meliputi jumlah laporan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas, serta penanganan kawasan kumuh, dengan target dan capaian masing-masing sebanyak 1 laporan. Selain itu, indikator jumlah rumah swadaya di kawasan permukiman ditargetkan sebanyak 1.279 unit dan seluruhnya telah terealisasi sesuai target.

Sasaran kegiatan kedua pada direktorat ini adalah meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu. Indikatornya berupa luas kawasan kumuh yang ditangani, dengan target sebesar 19,92 hektar, dan capaian hingga Triwulan IV juga mencapai 19,92 hektar, sehingga target ini dinyatakan tercapai.

Pada Unit Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, program yang dilaksanakan adalah Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sasaran kegiatan pertama berkaitan dengan peningkatan kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perkotaan. Indikatornya berupa jumlah laporan pemantauan dan evaluasi, dengan target dan realisasi masing-masing sebanyak 1 laporan.

Sasaran kegiatan berikutnya adalah meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perkotaan. Indikator yang digunakan adalah jumlah rumah swadaya perkotaan, dengan target sebesar 242 unit dan capaian hingga Triwulan IV juga mencapai 242 unit, sehingga sasaran ini telah tercapai sesuai rencana.

Tabel III-1 Capaian Kinerja Terhadap Target Berdasarkan Sasaran Kegiatan

UNIT ORGANISASI/PROGRAM/SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN		TARGET PK AWAL	TARGET CAPAIAN TRIWULAN IV
UO	SEKRETARIAT JENDERAL		
P	DUKUNGAN MANAJEMEN		
SK-1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal		
1	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan	1 Layanan
UO	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN		
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
SK-1	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di Kawasan Permukiman		
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan	1 Laporan
2	Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1279 Unit	1279 Unit
SK-2	Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu		
1	Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh	19,92 Hektar	19,92 Hektar
UO	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN		
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	1 Laporan
SK-2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan		
2	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	242 Unit	242 Unit
UO	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN		
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
SK-1	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan		
1	Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	1 Unit	1 Unit
SK-2	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan		
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	1 Laporan
SK-3	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan		
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Laporan	1 Laporan
2	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	1575 Unit	1575 Unit

Pada Unit Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, program yang dilaksanakan juga merupakan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sasaran kegiatan pertama adalah meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan. Indikatornya berupa jumlah

rumah susun asrama pendidikan keagamaan, dengan target dan capaian masing-masing sebanyak 1 unit.

Sasaran kegiatan kedua adalah meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan. Indikatornya berupa jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan, dengan target dan realisasi sebanyak 1 laporan.

Sasaran kegiatan ketiga adalah meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan. Indikator yang digunakan adalah jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan sebanyak 1 laporan, serta jumlah rumah swadaya perdesaan sebanyak 1.575 unit, yang seluruhnya telah terealisasi sesuai dengan target.

D. ANALISIS REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan kinerja penyerapan yang relatif baik. Total pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp87.715.562.000, dengan realisasi keuangan mencapai Rp78.125.296.025 atau 89,07%, sehingga masih terdapat sisa pagu sebesar Rp9.590.265.975 atau 10,93%. Dari sisi realisasi fisik, capaian mencapai 90,56%, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan kegiatan yang cukup tinggi dan selaras dengan realisasi keuangan.

Tabel III-2 Capaian Kinerja Terhadap Pagu Anggaran

NO	DIPA	PAGU (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SISA PAGU		REALISASI FISIK	
			Keu (Rp)	(%)	(Rp)	(%)	Fisik (Rp)	(%)
1	SEKJEN	617.919.000	536.850.044	86,88%	81.068.956	13,12%	617.919.000	100,00
2	KAWASAN PERMUKIMAN	41.151.876.000	37.066.150.056	90,07%	4.085.725.944	9,93%	38.692.231.197	94,02
3	PERDESAAN	40.142.318.000	35.001.304.025	87,19%	5.141.013.975	12,81%	34.325.843.000	85,51
4	PERKOTAAN	5.803.449.000	5.520.991.900	95,13%	282.457.100	4,87%	5.803.449.000	100,00
TOTAL		87.715.562.000	78.125.296.025	89,07%	9.590.265.975	10,93%	79.439.442.197	90,56%

Berdasarkan pembagian DIPA, Sekretariat Jenderal memiliki pagu sebesar Rp617.919.000, dengan realisasi keuangan Rp536.850.044 atau 86,88%, menyisakan pagu Rp81.068.956 atau 13,12%. Seluruh kegiatan di bawah Sekretariat Jenderal telah mencapai realisasi fisik 100%, yang menunjukkan bahwa dukungan manajemen dapat terlaksana secara optimal meskipun masih terdapat sisa anggaran.

Pada DIPA Kawasan Permukiman, pagu anggaran tercatat sebesar Rp41.151.876.000, dengan realisasi keuangan Rp37.066.150.056 atau 90,07%. Sisa pagu yang belum terserap sebesar Rp4.085.725.944 atau 9,93%. Dari sisi fisik, realisasi mencapai 94,02%, mencerminkan pelaksanaan kegiatan penanganan kawasan permukiman yang berjalan dengan baik, meskipun

terdapat beberapa kegiatan yang belum sepenuhnya terselesaikan hingga akhir periode pelaporan.

Selanjutnya, pada DIPA Perumahan Perdesaan, dari total pagu Rp40.142.318.000, realisasi keuangan mencapai Rp35.001.304.025 atau 87,19%, dengan sisa pagu sebesar Rp5.141.013.975 atau 12,81%. Realisasi fisik berada pada angka 85,51%, yang menunjukkan masih terdapat kegiatan fisik yang belum sepenuhnya terealisasi, antara lain dipengaruhi oleh faktor teknis pelaksanaan dan dinamika di lapangan.

Sementara itu, DIPA Perumahan Perkotaan memiliki pagu yang relatif lebih kecil, yaitu Rp5.803.449.000, namun menunjukkan kinerja penyerapan yang sangat baik. Realisasi keuangan mencapai Rp5.520.991.900 atau 95,13%, dengan sisa pagu Rp282.457.100 atau 4,87%. Dari sisi fisik, seluruh kegiatan telah mencapai realisasi 100%, menandakan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perumahan di wilayah perkotaan.

Secara keseluruhan, kinerja anggaran Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan pengelolaan anggaran yang cukup efektif, dengan realisasi keuangan dan fisik yang relatif seimbang. Meskipun masih terdapat sisa pagu dan deviasi fisik pada beberapa DIPA, capaian ini mencerminkan komitmen Satker dalam mendukung pencapaian target pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, berkelanjutan, dan berkeadilan di Provinsi Kalimantan Barat.

E. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal, baik sumber daya anggaran, sumber daya manusia, maupun sarana pendukung lainnya. Pengelolaan sumber daya tersebut dilakukan melalui perencanaan yang matang, penganggaran berbasis kinerja, serta pengendalian pelaksanaan yang berorientasi pada hasil (outcome).

Optimalisasi sumber daya tercermin dari kesesuaian antara target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan capaian hingga Triwulan IV, di mana seluruh indikator kinerja utama dapat direalisasikan sesuai dengan target. Hal ini menunjukkan bahwa setiap alokasi anggaran, waktu, dan tenaga kerja diarahkan secara efektif untuk mendukung pencapaian keluaran (output) yang telah direncanakan, seperti jumlah unit rumah yang tertangani, luas kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya, serta tersusunnya laporan pemantauan dan evaluasi sebagai instrumen pengendalian kinerja.

Selain itu, pemanfaatan sumber daya dilakukan secara terintegrasi antarunit organisasi, sehingga tercipta sinergi antara fungsi teknis dan fungsi dukungan manajemen. Pendekatan ini memungkinkan pelaksanaan kegiatan berjalan lebih efisien, meminimalkan pemborosan, serta mengurangi risiko keterlambatan atau duplikasi pekerjaan. Dengan demikian, sumber daya yang tersedia tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan kegiatan, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Keberhasilan dalam mencapai target kinerja juga menunjukkan adanya keseimbangan antara aspek keuangan dan fisik, di mana realisasi anggaran diikuti oleh capaian fisik yang sepadan. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran tidak semata-mata berorientasi pada penyerapan, tetapi benar-benar dikonversikan menjadi keluaran nyata yang mendukung sasaran strategis organisasi.

Secara keseluruhan, kemampuan Satuan Kerja dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien telah berkontribusi signifikan terhadap pencapaian kinerja organisasi. Praktik ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang akuntabel, berorientasi hasil, dan berkelanjutan.

F. ANALISIS PEMANFAATAN INFORMASI DALAM PELAPORAN KINERJA

Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja merupakan elemen penting dalam mendukung pengambilan keputusan, pengendalian pelaksanaan program, serta peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian. Informasi kinerja yang disajikan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan pada setiap entitas organisasi.

Pada tingkat Sekretariat Jenderal, informasi kinerja dimanfaatkan untuk mendukung fungsi koordinasi, fasilitasi, dan penguatan tata kelola organisasi. Data mengenai capaian dukungan manajemen, tingkat layanan administrasi, serta efektivitas pengelolaan sumber daya digunakan untuk memastikan bahwa seluruh unit kerja memperoleh dukungan yang memadai. Informasi ini menjadi dasar dalam penyempurnaan sistem kerja, penguatan kapasitas aparatur, serta peningkatan kualitas pelayanan internal kementerian.

Pada entitas Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, informasi kinerja dimanfaatkan sebagai instrumen pengendalian teknis dan spasial pembangunan. Data terkait luasan kawasan kumuh yang tertangani, progres peningkatan kualitas permukiman, serta hasil pemantauan dan evaluasi lapangan digunakan untuk mengidentifikasi wilayah prioritas, mengukur efektivitas intervensi, dan menyesuaikan strategi pelaksanaan program. Informasi ini juga berperan penting dalam memastikan bahwa pendekatan penanganan dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Sementara itu, pada Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, informasi kinerja dimanfaatkan untuk mengelola kompleksitas pembangunan di wilayah perkotaan yang memiliki tekanan tinggi terhadap kebutuhan hunian, keterbatasan lahan, dan dinamika sosial ekonomi. Data mengenai jumlah unit rumah yang tertangani, capaian pembangunan, serta hasil evaluasi pelaksanaan program digunakan untuk memperkuat integrasi antarprogram, meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Informasi ini juga menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat perkotaan.

Pada Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, pemanfaatan informasi kinerja difokuskan pada pemerataan akses hunian layak serta penguatan ketahanan sosial ekonomi masyarakat desa. Data capaian pembangunan rumah baru, peningkatan kualitas rumah swadaya, serta hasil pemantauan lapangan digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan pelayanan, mengevaluasi efektivitas program berbasis masyarakat, dan menyusun strategi pemberdayaan yang lebih tepat sasaran. Informasi ini mendukung perencanaan berbasis kebutuhan riil masyarakat perdesaan.

Secara lintas entitas, informasi kinerja dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, penajaman target, dan penentuan prioritas anggaran pada periode berikutnya. Integrasi data antar unit memungkinkan terciptanya sinergi kebijakan, mengurangi tumpang tindih program, serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan. Selain itu, pemanfaatan informasi kinerja juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik, karena capaian program dapat diakses, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Dengan demikian, informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi capaian, tetapi juga sebagai alat strategis dalam pengambilan keputusan, perbaikan kinerja, dan penguatan tata kelola penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman secara berkelanjutan.

G. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN DAN PENYEBAB KEGAGALAN

Pencapaian kinerja Kementerian sebagaimana tercantum dalam tabel sasaran pada masing-masing entitas (Sekretariat Jenderal, Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perkotaan, dan Ditjen Perumahan Perdesaan) dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor-faktor tersebut berperan dalam menentukan tingkat keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan, baik yang bersifat output (jumlah unit, laporan, luasan) maupun outcome (peningkatan kualitas hunian dan kawasan).

1. Faktor Pendukung

- a. Keselarasan Perencanaan dan Sasaran
Keterkaitan yang kuat antara sasaran strategis kementerian dengan sasaran program dan sasaran kegiatan pada masing-masing unit kerja, sebagaimana terlihat pada tabel (misalnya target laporan, unit rumah, dan luasan kawasan kumuh), memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program.
- b. Kejelasan Indikator dan Target Kinerja
Penetapan indikator yang terukur, seperti jumlah laporan, jumlah unit rumah layak huni, dan luasan kawasan kumuh yang ditangani, memudahkan pemantauan, pengendalian, serta evaluasi capaian kinerja.
- c. Dukungan Sistem Manajemen dan Administrasi
Pada Sekretariat Jenderal, sasaran peningkatan layanan dukungan manajemen yang diwujudkan melalui penyusunan laporan menjadi fondasi penting bagi kelancaran pelaksanaan program teknis di seluruh direktorat jenderal.
- d. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat
Khususnya pada Ditjen Kawasan Permukiman, Perumahan Perkotaan, dan Perdesaan, keterlibatan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat mendorong percepatan pencapaian target fisik, seperti pembangunan rumah swadaya, rusun, dan penanganan kawasan kumuh.
- e. Pemanfaatan Data dan Informasi
Penggunaan data kebutuhan perumahan, hasil pemantauan lapangan, serta laporan evaluasi mendukung ketepatan sasaran dan pengambilan keputusan berbasis bukti.

2. Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan Anggaran dan Waktu Pelaksanaan
Meskipun target telah ditetapkan secara jelas, keterbatasan fiskal dan waktu pelaksanaan kegiatan sering membatasi ruang lingkup dan kualitas hasil yang dapat dicapai.
- b. Variasi Kapasitas Daerah
Perbedaan kemampuan teknis dan kelembagaan pemerintah daerah memengaruhi kecepatan dan mutu pelaksanaan kegiatan, terutama pada program yang bersifat fisik dan berbasis komunitas.
- c. Kendala Teknis dan Lapangan
Faktor geografis, cuaca, kondisi tanah, serta aksesibilitas lokasi menjadi tantangan utama dalam pembangunan perumahan dan penanganan kawasan kumuh.
- d. Koordinasi Lintas Sektor

Beberapa sasaran, seperti penanganan kawasan kumuh terpadu dan penyediaan hunian layak, memerlukan sinergi lintas sektor yang belum sepenuhnya optimal.

e. Aspek Sosial dan Partisipasi Masyarakat

Tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap program bervariasi, sehingga memerlukan pendekatan sosialisasi yang lebih intensif.

Secara umum, pencapaian sasaran pada masing-masing entitas dalam tabel menunjukkan bahwa sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja telah berjalan dengan baik. Namun, untuk meningkatkan efektivitas capaian, diperlukan penguatan koordinasi, optimalisasi pemanfaatan data, peningkatan kapasitas daerah, serta pengelolaan risiko yang lebih adaptif terhadap dinamika lapangan. Dengan demikian, kinerja kementerian diharapkan semakin berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis penyediaan hunian layak dan penanganan kawasan permukiman secara berkelanjutan.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan infrastruktur bidang perumahan, diharapkan output serta outcome Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dapat berkontribusi maksimal dalam mendukung pembangunan nasional secara komprehensif pada umumnya dan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat pada khususnya. Laporan kinerja ini mendeskripsikan berbagai hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang tahun 2025.

B. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Untuk meningkatkan dan perbaikan kinerja organisasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan untuk dilakukan ke depan, antara lain:

1. Verifikasi persyaratan penerima bantuan yang lebih maksimal dan kredibel, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi teknis;
2. Peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kualitas rumah swadaya sehingga segala permasalahan-permasalahan dapat dideteksi sejak dini;
3. Melaksanakan proses lelang sedini mungkin sehingga masih memiliki waktu ketika terjadi proses lelang ulang;
4. Metode kerja pelaksanaan yang mampu mencerminkan efisiensi dan efektivitas sehingga pelaksanaan pembangunan perumahan dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat mutu serta tepat biaya.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI KEGIATAN TRIWULAN III

Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat pada Triwulan III TA 2025.

KEGIATAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA TRIWULAN III TA 2025

Verifikasi Calon Penerima Bantuan Tahun Anggaran 2025 Juli - Agustus 2025



Seleksi Pemilihan Calon Bank/Pos Penyalur 14 – 28 Agustus 2025



KEGIATAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA TRIWULAN III TA 2025

Arahan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

28 Agustus 2025



Sosialisasi program BSPS

September 2025



KEGIATAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA TRIWULAN III TA 2025

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bank/Pos Penyalur

10 September 2025



KEGIATAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA TRIWULAN III TA 2025

Pembekalan Tenaga Fasilitator Lapangan

10-12 September 2025



KEGIATAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA TRIWULAN III TA 2025

Survei Harga Satuan Bahan Bangunan

16 – 24 September 2025



KEGIATAN RUMAH SUSUN TRIWULAN III TA 2025

Workshop Persiapan Pengadaan Proyek Fisik Tahun Anggaran 2025

24-25 Agustus 2025



Survei Harga Pokok Paket Pembangunan Rumah Susun

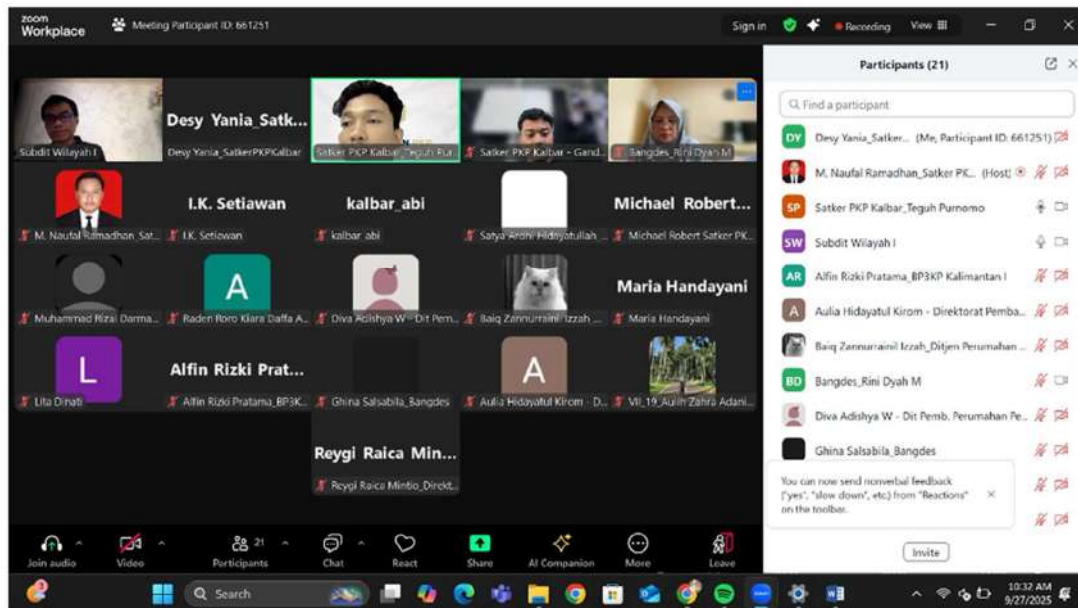
22 September 2025



KEGIATAN RUMAH SUSUN TRIWULAN III TA 2025

Rapat Pembahasan Hasil Reviu Dokumen Perencanaan Teknis
Paket Pembangunan Rumah Susun

28 Agustus 2025



KEGIATAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH TRIWULAN III TA 2025

Tahapan Tender Kegiatan Penanganan Kumuh

Tahap Tender Saat Ini [10080631000] Penanganan Sarana dan Prasarana Permukiman Kumuh Desa Parit Baru Kab. Kubu Raya

No Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1 Pengumuman Pascakualifikasi	12 September 2025 11:00	22 September 2025 13:00	1 kali perubahan
2 Download Dokumen Pemilihan	12 September 2025 12:00	22 September 2025 13:00	1 kali perubahan
3 Pemberian Penjelasan	16 September 2025 09:00	16 September 2025 12:00	Tidak Ada
4 Upload Dokumen Penawaran	16 September 2025 13:00	22 September 2025 13:00	1 kali perubahan
5 Pembukaan Dokumen Penawaran	22 September 2025 13:01	22 September 2025 13:02	1 kali perubahan
6 Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	22 September 2025 13:01	28 Oktober 2025 14:30	4 kali perubahan
7 Pembuktian Kualifikasi	20 Oktober 2025 09:00	28 Oktober 2025 14:30	3 kali perubahan
8 Penetapan Pemenang	28 Oktober 2025 14:31	28 Oktober 2025 15:00	3 kali perubahan
9 Pengumuman Pemenang	28 Oktober 2025 15:01	28 Oktober 2025 15:30	3 kali perubahan
10 Masa Sanggah	28 Oktober 2025 15:31	3 November 2025 15:59	3 kali perubahan
11 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	4 November 2025 08:00	7 November 2025 15:59	3 kali perubahan
12 Penandatanganan Kontrak	4 November 2025 08:00	7 November 2025 15:59	3 kali perubahan

Arahan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

28 Agustus 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN TRIWULAN IV

Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat pada Triwulan IV TA 2025.

KEGIATAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA TRIWULAN IV TA 2025

Pemilihan Terbuka Toko

16 – 27 Oktober 2025



Serah Terima Buku Tabungan

Oktober 2025



Pelaksanaan Program BSPS

01 – 31 Desember 2025



KEGIATAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA TRIULAN IV TA 2025

Penyerahan Upah Tukang Tahap I

28 November 2025 – 02 Desember 2025



Realisasi Program BSPS Tahun Anggaran 2025

Desember 2025



KEGIATAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA TRIWULAN IV TA 2025

Kegiatan Evaluasi Akhir

15-17 Desember 2025)



Penyerahan Upah Tukang Tahap II

24 – 30 Desember 2025



KEGIATAN RUMAH SUSUN TRIWULAN IV TA 2025

Paket Pembangunan Rumah Susun Tayang di SPSE Nasional

02 Oktober 2025

Informasi Tender			
Pengumuman Peserta Hasil Evaluasi Pemenang Pemenang Berkontrak			
Kode Tender	10088031000		
Nama Tender	Pembangunan Rumah Susun SMA Pancasetya Kalimantan Barat		
Rencana Umum Pengadaan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana
	603090603	Pembangunan Rumah Susun SMA Pancasetya Kalimantan Barat	APBN
Uraian Singkat Pekerjaan	URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SMA PANCA SETYA KALIMANTAN BARAT.pdf		
Tanggal Pembuatan	2 Oktober 2025		
Tahap Tender Saat Ini	Tender Sudah Selesai		
K/L/PD/Instansi Lainnya	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Satuan Kerja	04 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat		
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi		
Metode Pengadaan	Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur		
Reverse Auction?	Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction		
Tahun Anggaran	APBN 2025 - APBN 2026		
Nilai Pagu Paket	Rp. 8.783.000.000,00	Nilai KPS Paket	Rp. 8.782.625.000,00
Jenis Kontrak	Harga Satuan		
Lokasi Pekerjaan	• Tj. Puri, Kec. Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat - Sintang (Kab.)		
Kualifikasi Usaha	Kecil		
Syarat Kualifikasi	Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas		
	Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.		
	Jenis Izin	Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Kualifikasi/Sub Kualifikasi	

Paket MK Pembangunan Rumah Susun tayang di SPSE Nasional

02 Oktober 2025

Informasi Tender			
Pengumuman Peserta Hasil Evaluasi Pemenang Pemenang Berkontrak			
Kode Tender	10088034000		
Nama Tender	Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Susun SMA Pancasetya Kalimantan Barat Evaluasi Uang		
Rencana Umum Pengadaan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana
	60819964	Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Susun SMA Pancasetya Kalimantan Barat	APBN
Uraian Singkat Pekerjaan	URAIAN SINGKAT PEKERJAAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SMA PANCA SETYA KALIMANTAN BARAT.pdf		
Tanggal Pembuatan	2 Oktober 2025		
Tahap Tender Saat Ini	Tender Sudah Selesai		
K/L/PD/Instansi Lainnya	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Satuan Kerja	04 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat		
Jenis Pengadaan	Jasa Konsultasi Badan Usaha Konstruksi		
Metode Pengadaan	Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya		
Reverse Auction?	Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction		
Tahun Anggaran	APBN 2026 - APBN 2025		
Nilai Pagu Paket	Rp. 621.600.000,00	Nilai KPS Paket	Rp. 621.600.000,00
Jenis Kontrak	Waktu Penugasan		
Lokasi Pekerjaan	• Tj. Puri, Kec. Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat - Sintang (Kab.)		
Bobot Teknis	80,0		
Bobot Biaya	20,0		
Syarat Kualifikasi	Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas		
	Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.		



KEGIATAN RUMAH SUSUN TRIWULAN IV TA 2025

Paket MK Pembangunan Rumah Susun Sedang Tahap Tender

9 Okt – 22 Des 2025

Tahap Tender Saat Ini [1008034000] Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Susun SMA Pancasetya Kalimantan Barat			
No Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1 Pengumuman Prakuifikasi	9 Oktober 2025 15:00	16 Oktober 2025 15:00	Tidak Ada
2 Download Dokumen Kualifikasi	9 Oktober 2025 15:00	27 Oktober 2025 15:30	1 kali perubahan
3 Penjelasan Dokumen Prakuifikasi	13 Oktober 2025 10:00	13 Oktober 2025 13:00	Tidak Ada
4 Kirim Persyaratan Kualifikasi	13 Oktober 2025 13:01	27 Oktober 2025 15:30	2 kali perubahan
5 Evaluasi Dokumen Kualifikasi	27 Oktober 2025 15:31	17 November 2025 09:00	5 kali perubahan
6 Pembuktian Kualifikasi	27 Oktober 2025 15:31	17 November 2025 09:00	5 kali perubahan
7 Penetapan Hasil Kualifikasi	17 November 2025 09:01	17 November 2025 10:25	5 kali perubahan
8 Pengumuman Hasil Prakuifikasi	17 November 2025 10:26	17 November 2025 10:30	5 kali perubahan
9 Masa Sanggah Prakuifikasi	17 November 2025 10:31	24 November 2025 10:31	4 kali perubahan
10 Download Dokumen Pemilihan	24 November 2025 10:32	1 Desember 2025 10:00	3 kali perubahan
11 Pemberian Penjelasan	27 November 2025 10:00	27 November 2025 13:00	2 kali perubahan
12 Upload Dokumen Penawaran	27 November 2025 13:01	1 Desember 2025 10:00	2 kali perubahan
13 Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis	15 Desember 2025 15:15	16 Desember 2025 11:00	7 kali perubahan
14 Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis	16 Desember 2025 11:01	16 Desember 2025 11:30	7 kali perubahan
15 Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga	16 Desember 2025 11:31	16 Desember 2025 12:00	8 kali perubahan
16 Penetapan Pemenang	16 Desember 2025 12:01	16 Desember 2025 13:00	7 kali perubahan
17 Pengumuman Pemenang	16 Desember 2025 13:01	16 Desember 2025 13:30	7 kali perubahan
18 Masa Sanggah	16 Desember 2025 13:31	22 Desember 2025 08:00	7 kali perubahan
19 Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	22 Desember 2025 08:01	22 Desember 2025 16:00	4 kali perubahan
20 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	22 Desember 2025 08:01	29 Desember 2025 16:00	5 kali perubahan
21 Penandatanganan Kontrak	22 Desember 2025 08:01	29 Desember 2025 16:00	5 kali perubahan

Paket Pembangunan Rumah Susun Sedang Tahap Tender

17 Okt – 8 Des 2025

Tahap Tender Saat Ini [1008031000] Pembangunan Rumah Susun SMA Pancasetya Kalimantan Barat			
No Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1 Pengumuman Pascakuifikasi	17 Oktober 2025 16:00	24 Oktober 2025 08:00	Tidak Ada
2 Download Dokumen Pemilihan	17 Oktober 2025 16:00	24 Oktober 2025 08:00	Tidak Ada
3 Pemberian Penjelasan	20 Oktober 2025 08:00	20 Oktober 2025 10:00	Tidak Ada
4 Upload Dokumen Penawaran	20 Oktober 2025 12:00	24 Oktober 2025 08:00	Tidak Ada
5 Pembukaan Dokumen Penawaran	24 Oktober 2025 08:01	24 Oktober 2025 08:59	Tidak Ada
6 Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	24 Oktober 2025 09:00	18 November 2025 13:00	2 kali perubahan
7 Pembuktian Kualifikasi	24 Oktober 2025 09:00	18 November 2025 13:00	2 kali perubahan
8 Penetapan Pemenang	18 November 2025 13:01	18 November 2025 13:30	2 kali perubahan
9 Pengumuman Pemenang	18 November 2025 13:31	18 November 2025 13:59	2 kali perubahan
10 Masa Sanggah	18 November 2025 14:00	24 November 2025 08:00	3 kali perubahan
11 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	24 November 2025 08:01	28 November 2025 15:59	3 kali perubahan
12 Penandatanganan Kontrak	1 Desember 2025 08:00	8 Desember 2025 15:59	3 kali perubahan

07 Januari 2026 08:55 WIB

© 2006-2025 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Aplikasi SPSE v4.5a.20250521

KEGIATAN RUMAH SUSUN TRIWULAN IV TA 2025

Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Pembangunan Rumah Susun

5 Desember 2025



Penandatanganan Kontrak Pembangunan Rumah Susun

8 Desember 2025



KEGIATAN RUMAH SUSUN TRIWULAN IV TA 2025

Mutual Check Awal

9 Desember 2025



Rapat Persiapan Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Rumah Susun

10 Desember 2025



KEGIATAN RUMAH SUSUN TRIWULAN IV TA 2025

Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Rumah Susun



Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak MK Pembangunan Rumah Susun

22 Desember 2025



KEGIATAN RUMAH SUSUN TRIWULAN IV TA 2025

Penandatanganan Kontrak MK Pembangunan Rumah Susun

22 Desember 2025



KEGIATAN BANTUAN SANITASI TRIWULAN IV TA 2025

Rapat Persiapan Pekerjaan Bantuan Sanitasi

22 Oktober 2025



Rapat Bersama Kepala Desa

28 Oktober 2025



KEGIATAN BANTUAN SANITASI TRIWULAN IV TA 2025

Tanda Tangan Kontrak Bersama Pihak Toko Bangunan

5 November 2025



KEGIATAN BANTUAN SANITASI TRIWULAN IV TA 2025

OJT Tukang Program Bantuan Sanitasi

6 November 2025



Pengiriman Bahan Material

10 November - 31 Desember 2025



KEGIATAN BANTUAN SANITASI TRIWULAN IV TA 2025

Pekerjaan Pondasi

10 November - 31 Desember 2025



Pekerjaan Pengecoran

10 November - 31 Desember 2025



KEGIATAN BANTUAN SANITASI TRIWULAN IV TA 2025

Pekerjaan Plesteran

10 November - 31 Desember 2025



Pekerjaan Pemasangan Batako

10 November - 31 Desember 2025



KEGIATAN BANTUAN SANITASI TRIWULAN IV TA 2025

Pekerjaan Galian

10 November - 31 Desember 2025



Monitoring Pekerjaan Awal

17 November 2025



KEGIATAN BANTUAN SANITASI TRIWULAN IV TA 2025

Monitoring Lanjutan

28 November 2025



Rapat Evaluasi Kinerja

5 Desember 2025



KEGIATAN BANTUAN SANITASI TRIWULAN IV TA 2025

Monitoring Bersama Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

10 Desember 2025



KEGIATAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH TRIWULAN IV TA 2025

Pre Award Meeting dan Penandatanganan Kontrak

20 November 2025



KEGIATAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH TRIWULAN IV TA 2025

Sosialisasi Kegiatan Bersama Kepala Desa dan Dinas Perkim Kubu Raya

22 November 2025



Pre Construction Meeting

22 November 2025



KEGIATAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH TRIWULAN IV TA 2025

Show Cause Meeting 1

11 Desember 2025



Show Cause Meeting 2

19 Desember 2025



KEGIATAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH TRIWULAN IV TA 2025

Pelaksanaan Kegiatan Pembersihan Sendimen Saluran

22 Nov - 31 Des 2025



Pengukuran Eksisting dan Saluran Uditech

22 Nov - 31 Des 2025



KEGIATAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH TRIWULAN IV TA 2025

Pekerjaan Galian dan Pemasangan Uditech

22 Nov - 31 Des 2025



Pekerjaan Pemasangan Paving

22 Nov - 31 Des 2025



KEGIATAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH TRIWULAN IV TA 2025

Pengecekan Uditech

22 Nov - 31 Des 2025



Pemasangan Uditch Ukuran 50

22 Nov - 31 Des 2025



Pemasangan Uditch Ukuran 100

22 Nov - 31 Des 2025





MEWUJUDKAN HUNIAN LAYAK DI **KALIMANTAN BARAT**

PROFIL

SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2025

SAMBUTAN

Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Buku Profil Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dapat disusun dan diterbitkan sebagai media informasi mengenai peran dan pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Barat.

Pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai kementerian tersendiri pada Tahun 2025 merupakan langkah strategis Pemerintah dalam memperkuat fokus pembangunan sektor perumahan, sejalan dengan arah pembangunan nasional dan Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah.

Melalui pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman, kami berkomitmen untuk menghadirkan hunian yang lebih layak serta lingkungan permukiman yang lebih berkualitas bagi masyarakat Kalimantan Barat.

Sebagai bagian dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat mendukung pelaksanaan program di daerah dengan memperhatikan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat. Buku profil ini menyajikan gambaran singkat satuan kerja serta dokumentasi visual pelaksanaan program Tahun Anggaran 2025.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I, pemerintah daerah, tenaga pendamping, dan seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan sinergi yang telah terjalin. Semoga buku profil ini bermanfaat sebagai sarana informasi dan dokumentasi.

Rabu, 31 Desember 2025

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kalimantan Barat



Michael Robert, S.T.

197206082006041002



DAFTAR ISI

Dasar Hukum	4
Sekilas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	6
Profil Satuan Kerja PKP Provinsi Kalimantan Barat	8
Sumber Daya Manusia	10
Overview Realisasi Anggaran dan Kinerja Program	14
Realisasi Program	16
Penutup	24

DASAR HUKUM

- Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor: 04/SE/DT/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor: 03/SE/DT/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor: 02/SE/DT/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Permukiman.
- Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, sepanjang relevan dengan penyelenggaraan program perumahan dan kawasan permukiman.



An aerial photograph showing a residential area with rows of houses. The houses have dark roofs and are arranged in a grid-like pattern. In the background, there is a dense forest and a range of mountains under a clear sky. The overall tone of the image is muted, with a focus on the architectural layout and natural surroundings.

Pelaksanaan tugas dan dukungan kegiatan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dasar hukum ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan organisasi, pelaksanaan program, serta pengelolaan administrasi kegiatan perumahan dan kawasan permukiman agar berjalan tertib, akuntabel, dan selaras dengan arah kebijakan nasional.

Seiring dengan pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai kementerian tersendiri, pengaturan kelembagaan dan pelaksanaan program masih terus berkembang. Oleh karena itu, satuan kerja melaksanakan kegiatan dengan mengacu pada peraturan dan petunjuk teknis yang berlaku pada Tahun Anggaran 2025.

SEKILAS KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

LATAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN PKP

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dibentuk sebagai kementerian tersendiri pada Tahun 2024 sebagai bagian dari penataan kelembagaan Pemerintah dalam Kabinet Merah Putih. Pembentukan kementerian ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat fokus pembangunan di sektor perumahan dan kawasan permukiman, mengingat perumahan merupakan kebutuhan dasar yang berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pembentukan Kementerian PKP, Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menangani isu perumahan secara lebih terarah dan berkelanjutan, termasuk pemenuhan hunian layak bagi masyarakat, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, serta penataan kawasan permukiman agar lebih sehat, aman, dan tertata. Kementerian PKP hadir untuk memastikan bahwa kebijakan dan program perumahan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas lingkungan dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

PERAN KEMENTERIAN PKP DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, Kementerian PKP menjalankan peran strategis yang mencakup fungsi operator, regulator, dan fasilitator. Ketiga peran tersebut dijalankan secara terpadu untuk mendukung pencapaian target pembangunan perumahan nasional.

PERUMAHAN DALAM ASTA CITA PRESIDEN

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dibentuk untuk mendukung pencapaian visi pembangunan nasional dan Asta Cita Presiden, khususnya dalam peningkatan lapangan kerja dan infrastruktur, pemerataan pembangunan dari bawah, serta penguatan kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan.

Sektor perumahan diposisikan sebagai salah satu instrumen utama untuk mendorong pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan penguatan ketahanan sosial.



OPERATOR

Kementerian PKP melaksanakan secara langsung berbagai program pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan serta kawasan permukiman.



REGULATOR

Kementerian PKP menyusun dan menetapkan kebijakan serta regulasi yang memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan percepatan dalam pembangunan perumahan.



FASILITATOR

Kementerian PKP mendorong kolaborasi lintas sektor dan memfasilitasi pembiayaan perumahan guna memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.



PROGRAM PEMBANGUNAN DAN RENOVASI 3 JUTA RUMAH

3 JUTA RUMAH

Program Pembangunan dan Renovasi 3 (tiga) Juta Rumah merupakan program strategis nasional yang menjadi fokus utama Kementerian PKP. Program ini diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau, sekaligus mempercepat penurunan backlog perumahan secara nasional.

Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah dilakukan melalui berbagai bentuk intervensi, antara lain pembangunan dan peningkatan kualitas rumah masyarakat, penyediaan rumah susun, penanganan kawasan permukiman, serta dukungan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini dilaksanakan secara kolaboratif dengan pemerintah daerah, unit pelaksana teknis, satuan kerja di daerah, serta pemangku kepentingan lainnya, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan wilayah.

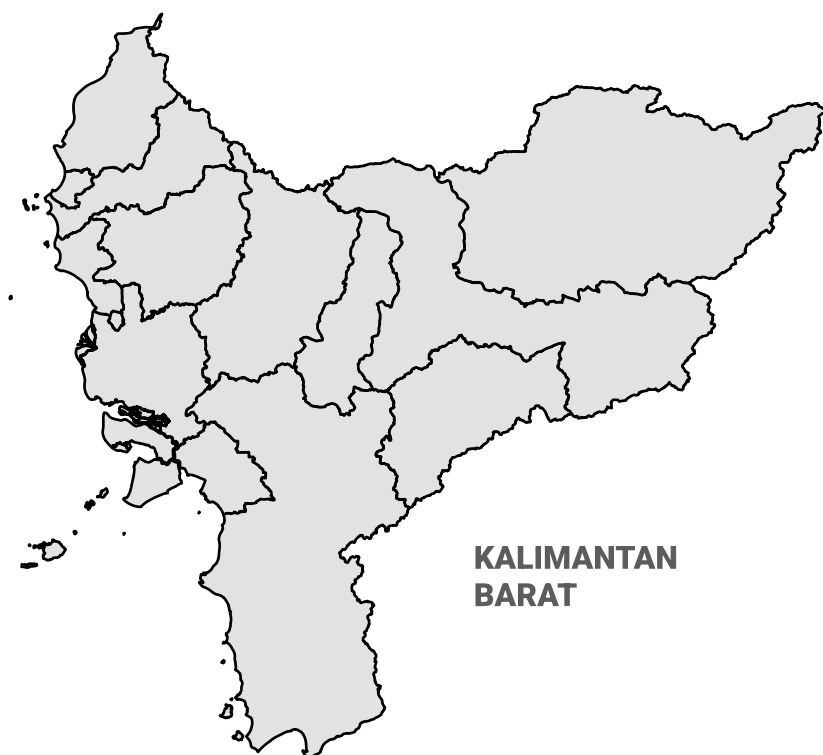
Melalui Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah, Kementerian PKP berupaya menghadirkan hunian yang tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

PROFIL SATUAN KERJA PKP PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat merupakan unit kerja yang berada di bawah koordinasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I. Dalam struktur kelembagaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, satuan kerja berperan mendukung pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman di tingkat daerah.

Wilayah kerja Satuan Kerja PKP Provinsi Kalimantan Barat mencakup seluruh wilayah administratif Provinsi Kalimantan Barat, yang terdiri atas kabupaten dan kota dengan karakteristik wilayah yang beragam. Kondisi geografis yang luas dan heterogen menjadi konteks penting dalam pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman di daerah.



12

Total Kabupaten

2

Total Kota

±2.100

Total Desa dan Kelurahan

±147rb Km²

Luas Wilayah

TANTANGAN PELAKSANAAN PROGRAM

Sebaran wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang luas, dengan kondisi geografis dan aksesibilitas yang beragam, menuntut pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman yang adaptif dan terkoordinasi. Dalam konteks tersebut, Satuan Kerja PKP Provinsi Kalimantan Barat berperan mendukung pelaksanaan program agar tetap selaras dengan kebijakan nasional, sekaligus responsif terhadap kondisi dan kebutuhan wilayah di daerah.



TUGAS DAN PERAN SATUAN KERJA

Satuan Kerja PKP Provinsi Kalimantan Barat memiliki tugas mendukung pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta pembinaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I. Dalam pelaksanaannya, satuan kerja menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan program perumahan di daerah dengan menjembatani arah kebijakan nasional dan implementasi program di tingkat lapangan, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan selaras dengan ketentuan yang berlaku serta kebutuhan masyarakat setempat.

Melalui kedudukan tersebut, satuan kerja mendukung kelancaran pelaksanaan program sejak tahap persiapan hingga pelaporan hasil kegiatan. Dukungan ini mencakup penguatan koordinasi antar pihak terkait, penyiapan administrasi pelaksanaan, serta pengawalan tahapan kegiatan agar berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pendekatan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, tertib, dan akuntabel.

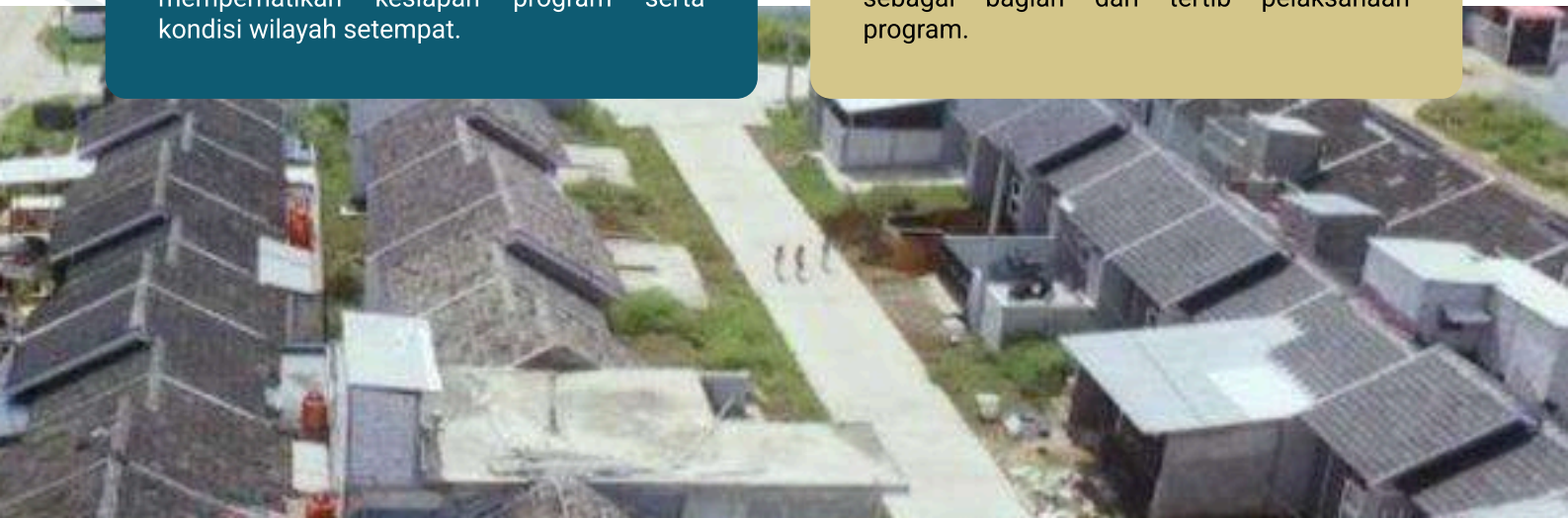
Dengan pendekatan kerja yang terstruktur dan berkelanjutan, satuan kerja turut berkontribusi dalam menjaga konsistensi pelaksanaan program di daerah, sekaligus memastikan bahwa hasil kegiatan dapat terdokumentasi dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

POLA PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman di daerah dilaksanakan secara bertahap dan terencana, dengan memperhatikan kesiapan program serta kondisi wilayah setempat.

PENGELOLAAN PELAKSANAAN

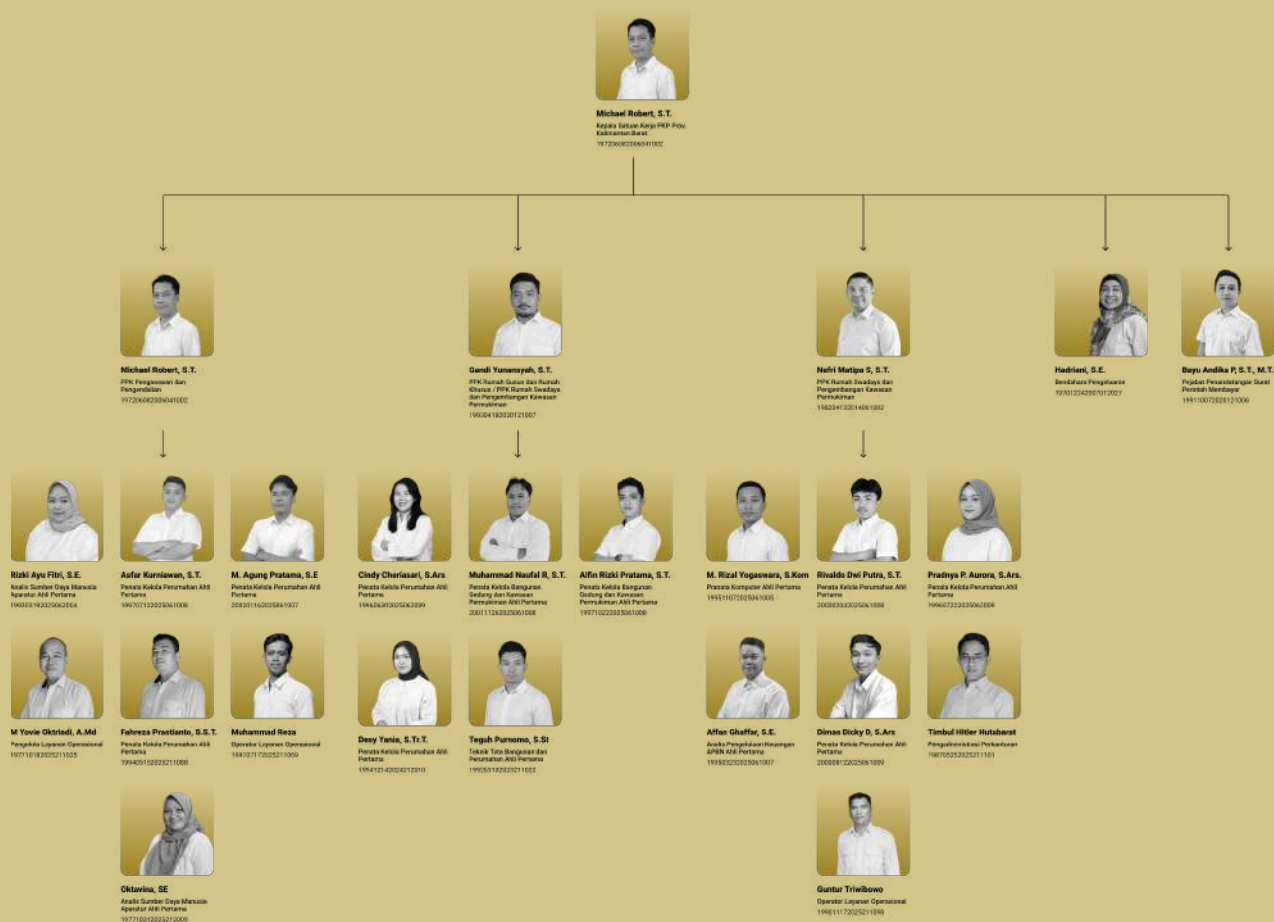
Pelaksanaan kegiatan didukung melalui pengelolaan administrasi, pemantauan tahapan kegiatan, serta penyusunan laporan sebagai bagian dari tertib pelaksanaan program.





SUMBER DAYA MANUSIA

STRUKTUR ORGANISASI



Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Kerja, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan administrasi satuan kerja. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Satuan Kerja didukung oleh pejabat pembendaharaan, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatanganan surat perintah membayar, serta unsur pelaksana teknis dan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan.

Struktur organisasi satuan kerja disusun untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program, efektivitas pengelolaan anggaran, serta akuntabilitas pelaporan kegiatan.



Michael Robert, S.T.

Kepala Satuan Kerja PKP Prov.
Kalimantan Barat
197206082006041002



Gandi Yunansyah, S.T.

PPK Rumah Susun dan Rumah
Khusus / PPK Rumah Swadaya
dan Pengembangan Kawasan
Permukiman
199304182020121007



Nefri Matipa S, S.T.

PPK Rumah Swadaya dan
Pengembangan Kawasan
Permukiman
198204132014061002



Bayu Andika P, S.T., M.T.

Pejabat Penandatanganan Surat
Perintah Membayar
199110072020121006



Hadriani, S.E.

Bendahara Pengeluaran
197012242007012027



Oktavina, SE

Analisis Sumber Daya Manusia
Aparatur Ahli Pertama
197710312025212009



Fahreza Prastianto, S.S.T.

Penata Kelola Perumahan Ahli
Pertama
199405152025211088



Muhammad Reza

Operator Layanan Operasional
199107172025211069



M Yovie Oktriadi, A.Md

Pengelola Layanan Operasional
197710182025211025



Desy Yania, S.Tr.T.

Penata Kelola Perumahan Ahli
Pertama
199412142024212010



Teguh Purnomo, S.St

Teknik Tata Bangunan dan
Perumahan Ahli Pertama
199203102023211023



Timbul Hitler Hutabarat

Pengadministrasi Perkantoran
198705252025211101

KOMPOSISI KEPEGAWAIAN



PNS



PPPK



CPNS



Guntur Triwibowo

Operator Layanan Operasional
199011172025211098



Rizki Ayu Fitri, S.E.

Analisis Sumber Daya Manusia
Aparatur Ahli Pertama
199303192025062004



Asfar Kurniawan, S.T.

Penata Kelola Perumahan Ahli
Pertama
199707122025061008



M. Agung Pratama, S.E

Penata Kelola Perumahan Ahli
Pertama
200201162025061007



Cindy Cheriasari, S.Ars

Penata Kelola Perumahan Ahli
Pertama
199606302025062009



Muhammad Naufal R, S.T.

Penata Kelola Bangunan
Gedung dan Kawasan
Permukiman Ahli Pertama
200111262025061008



Alfin Rizki Pratama, S.T.

Penata Kelola Bangunan
Gedung dan Kawasan
Permukiman Ahli Pertama
199710222025061008



Pradnya P. Aurora, S.Ars.

Penata Kelola Perumahan Ahli
Pertama
199607222025062009



M. Rizal Yogaswara, S.Kom

Pranata Komputer Ahli Pertama
199511072025061005



Rivaldo Dwi Putra, S.T.

Penata Kelola Perumahan Ahli
Pertama
200002042025061008



Dimas Dicky D, S.Ars

Penata Kelola Perumahan Ahli
Pertama
200008122025061009



Affan Ghaffar, S.E.

Analisis Pengelolaan Keuangan
APBN Ahli Pertama
199503232025061007

Dengan total 24 orang pegawai, satuan kerja menjalankan fungsi administratif, teknis, dan koordinatif secara terpadu. Pengelolaan sumber daya manusia diarahkan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program serta peningkatan kualitas layanan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

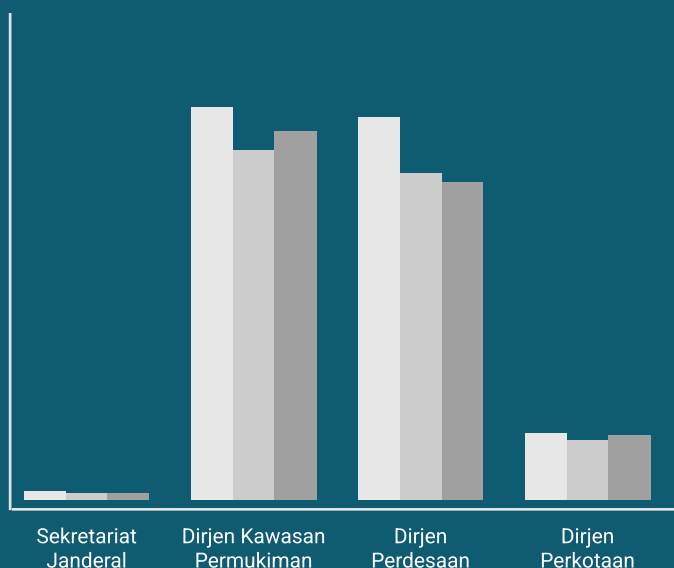
OVERVIEW REALISASI ANGGARAN DAN KINERJA PROGRAM

Halaman ini menyajikan gambaran umum realisasi anggaran dan capaian kinerja program pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025. Penyajian dilakukan dengan membandingkan pagu anggaran, realisasi keuangan, dan realisasi fisik pada masing-masing DIPA yang dikelola oleh satuan kerja, yaitu DIPA Sekretariat Jenderal, DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, DIPA Direktorat Jenderal Perdesaan, dan DIPA Direktorat Jenderal Perkotaan.

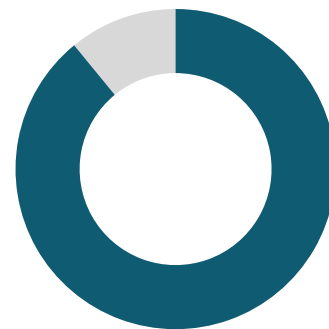
Sampai dengan 31 Desember 2025, pelaksanaan program pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan capaian yang positif. Secara kumulatif, realisasi program fisik telah mencapai 90,56%, sementara realisasi keuangan mencapai 89,07% dari total pagu anggaran yang dikelola oleh satuan kerja. Capaian tersebut mencerminkan progres pelaksanaan kegiatan yang berjalan sesuai dengan perencanaan dan tahapan yang telah ditetapkan.

Realisasi Anggaran Satuan Kerja

■ Pagu Anggaran ■ Realisasi Keuangan ■ Realisasi Fisik



*) Data tanggal 31 Desember 2025



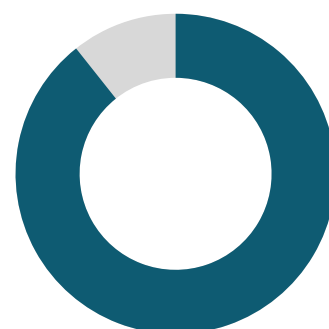
89.07%

Realisasi Keuangan
Satuan Kerja



73,91%

Realisasi Keuangan
Program Dukungan
Manajemen



89.32%

Realisasi Keuangan
Program Perumahan
dan Kawasan
Permukiman

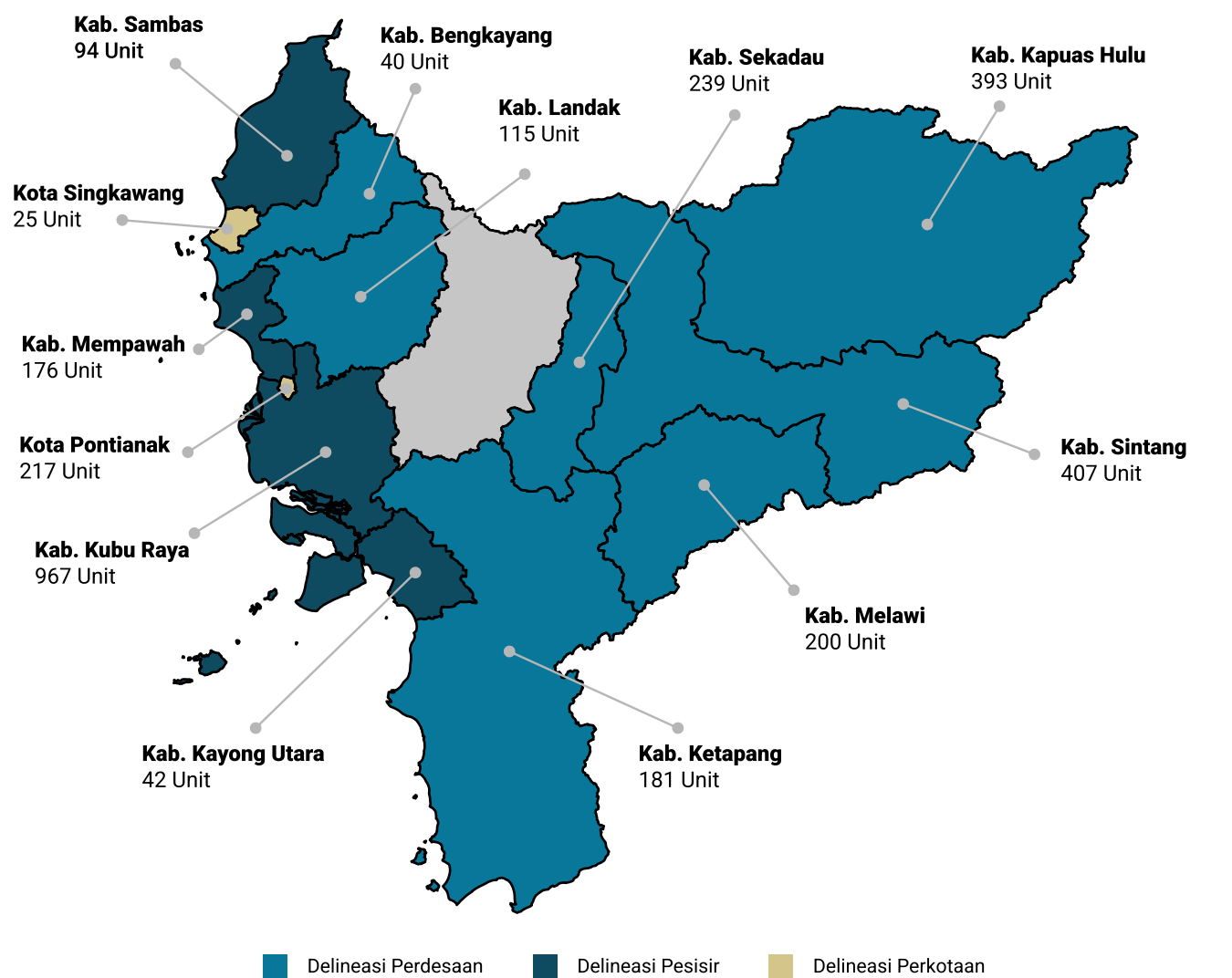
PAGU ANGGARAN DAN REALISASI PENYERAPAN

SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
STATUS : 31 DESEMBER 2025 (SP2D)

DIPA	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
		RP	%	%
Sekretariat Jenderal	Rp 617,919,000	Rp 536,850,044	86.88%	100.00%
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Rp 41,151,876,000	Rp 37,066,150,056	90.07%	94.02%
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Rp 40,142,318,000	Rp 35,001,304,025	87.19%	85.51%
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Rp 5,803,449,000	Rp 5,520,991,900	95.13%	100.00%
TOTAL	Rp 87,715,562,000	Rp 77,799,379,893	88.70%	90.56%



REALISASI PROGRAM BSPS



PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM BSPS

3096
Unit

DELINEASI	UNIT	PAGU	REALISASI KEUANGAN	
			RP	%
Pesisir	1279	Rp 27,886,316,000	Rp 27,505,639,550	98.63%
Perdesaan	1575	Rp 33,663,117,000	Rp 33,598,149,500	99.81%
Perkotaan	242	Rp 5,295,950,000	Rp 5,264,279,600	99.40%
TOTAL	3096	Rp 66,845,383,000	Rp 66,190,228,800	99.29%

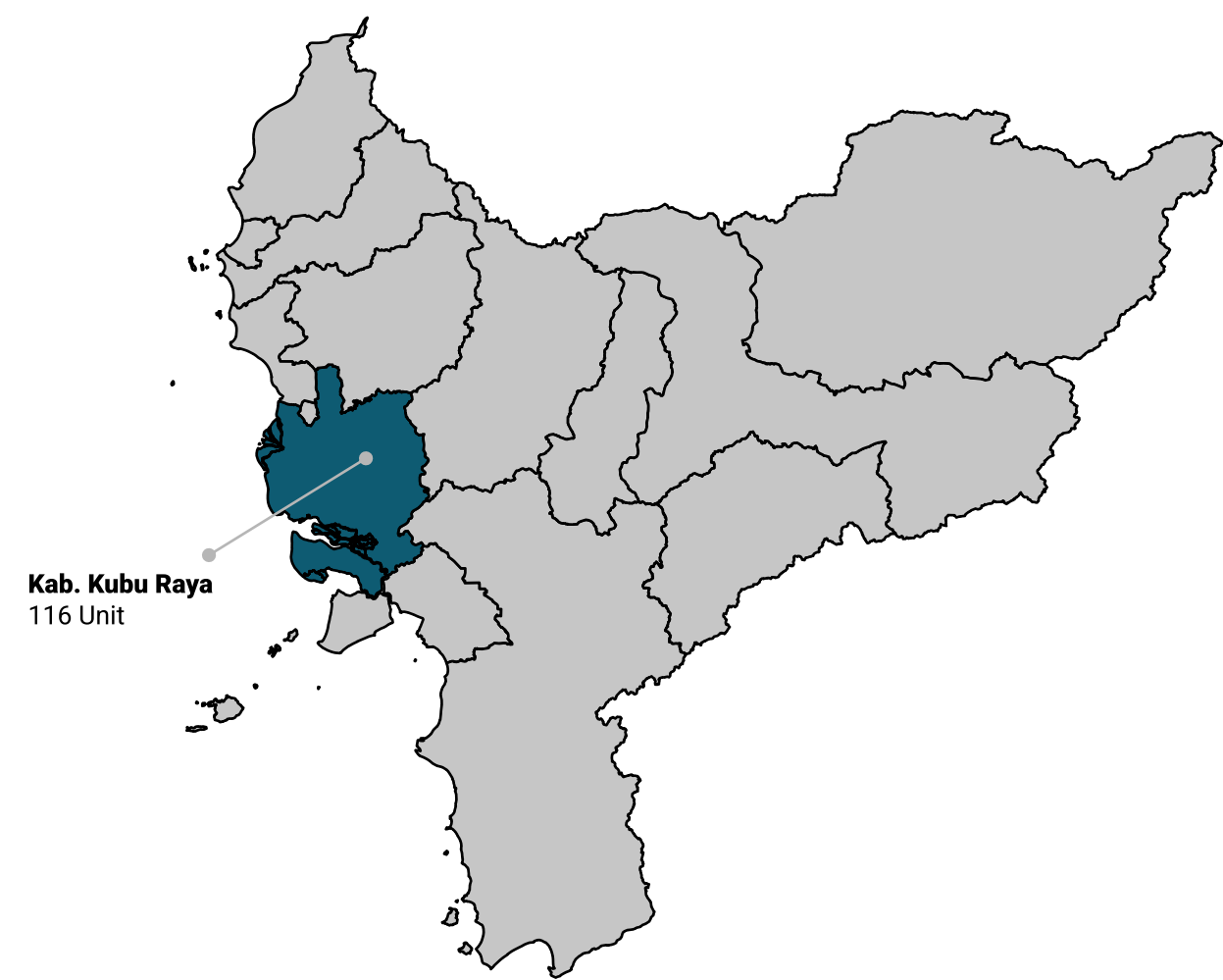
*) Data tanggal 31 Desember 2025



Pada Tahun Anggaran 2025, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Kalimantan Barat dialokasikan sebanyak 3.096 unit. Alokasi tersebut tersebar pada berbagai karakteristik wilayah, dengan rincian 1.279 unit di wilayah pesisir, 1.575 unit di wilayah perdesaan, dan 242 unit di wilayah perkotaan. Distribusi unit ini mencerminkan upaya pemenuhan kebutuhan peningkatan kualitas rumah masyarakat sesuai dengan kondisi dan sebaran permukiman di daerah.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, realisasi keuangan Program BSPS telah mencapai 99,29% dari pagu anggaran dan dengan realisasi fisik mencapai 100% dari total alokasi unit yang direncanakan. Program BSPS dilaksanakan di 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, kecuali Kabupaten Sanggau, dengan dukungan pendampingan dan koordinasi lintas pihak untuk memastikan pelaksanaan program berjalan tertib, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima bantuan.

REALISASI PROGRAM SANITASI



PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM SANITASI

116
Unit

DELINEASI	UNIT	PAGU	REALISASI KEUANGAN	
			RP	%
Perencanaan Bantuan Sanitasi		Rp 100,000,000	Rp -	0%
Pembangunan Bantuan Sanitasi	116	Rp 2,737,400,000	Rp 1,439,238,841	52.58%
Wasdal Bantuan Sanitasi		Rp 219,520,000	Rp 123,650,000	56.33%
TOTAL	116	Rp 3,056,920,000	Rp 1,562,888,841	51.13%

*) Data tanggal 31 Desember 2025



Pada Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan Program Bantuan Sanitasi di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan di Kabupaten Kubu Raya, dengan lokasi kegiatan meliputi Desa Sungai Raya, Desa Teluk Kapuas, Desa Arang Limbung, dan Desa Parit Baru. Program ini diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana sanitasi yang layak dan mendukung peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

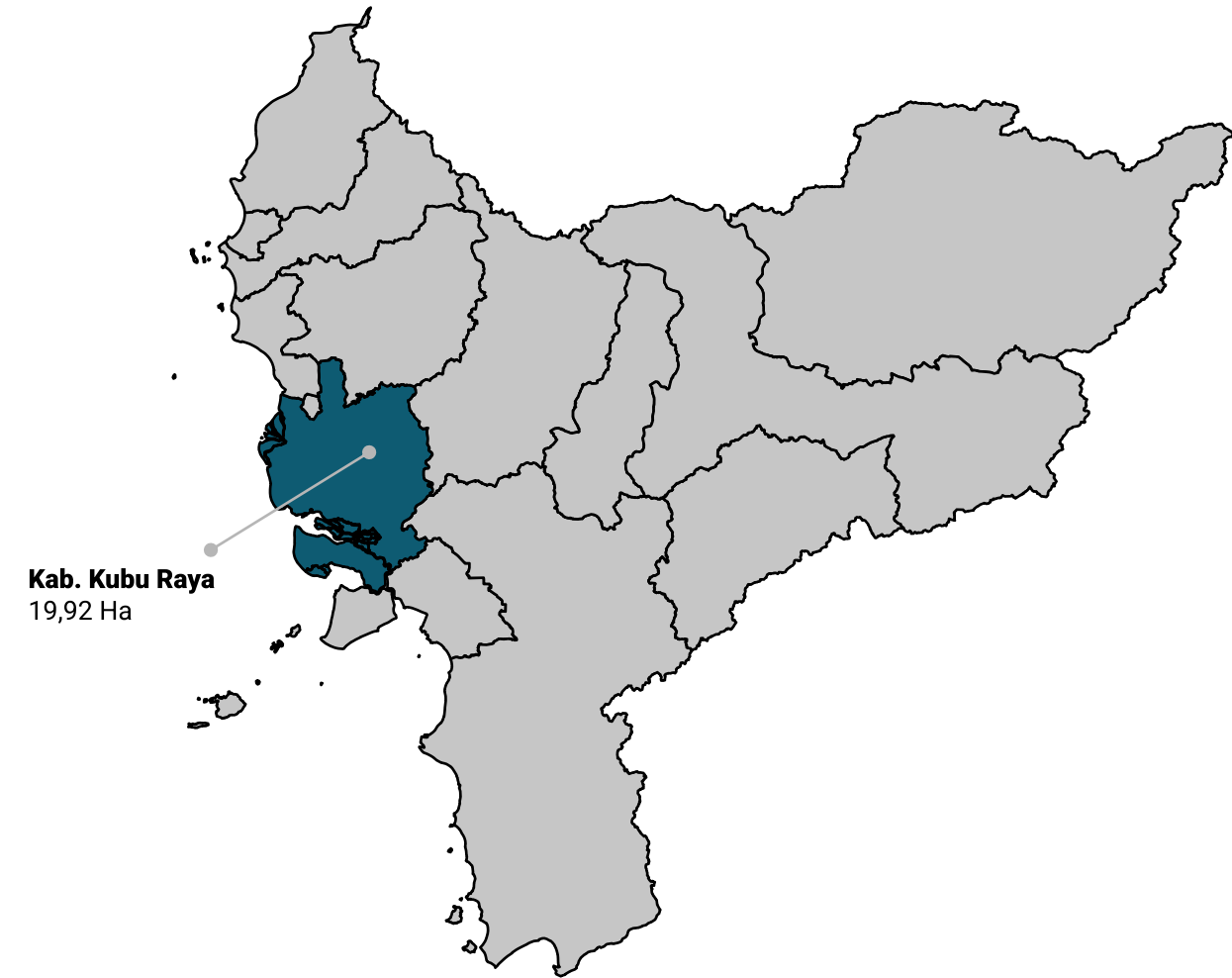
Berdasarkan Surat Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Nomor UM 0201-Rb10/745 tanggal 10 November 2025, terdapat perubahan penerima bantuan dan alokasi anggaran kegiatan Sanitasi di Kabupaten Kubu Raya, yang semula direncanakan sebanyak 175 unit dengan pagu anggaran sebesar Rp2.737.400.000, menjadi 116 unit dengan pagu anggaran sebesar Rp1.664.385.000. Namun demikian, sampai dengan 31 Desember 2025, perubahan pagu tersebut belum tercermin dalam sistem SAKTI, sehingga pagu yang tercatat masih sebesar Rp2.737.400.000.

Sampai dengan 31 Desember 2025, realisasi keuangan seluruh Program Sanitasi tercatat sebesar Rp 1,562,888,841, yang setara dengan 51.13% apabila dibandingkan dengan pagu awal yang masih tercatat di SAKTI. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan pagu hasil revisi, maka tingkat realisasi keuangan telah mencapai sekitar 86.47%.

Selain itu, Anggaran Perencanaan Bantuan Sanitasi pada awalnya dialokasikan sebesar Rp100.000.000. Dalam perjalanannya, pagu anggaran tersebut sempat mengalami penguncian (lock). Setelah pagu dibuka kembali di akhir tahun, anggaran tersebut tercatat belum terserap (0%). Hal ini disebabkan karena kegiatan perencanaan dilaksanakan melalui swakelola tipe I, sehingga tidak melibatkan pihak ketiga, dan anggaran perencanaan tersebut tidak digunakan.

Pagu Revisi Pembangunan Sanitasi	Realisasi Pembangunan Sanitasi	Persentase Pembangunan Sanitasi
Rp 1.664.385.000	Rp 1,439,238,841	86,47%

REALISASI PROGRAM PENANGANAN KUMUH



PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM PENANGANAN KUMUH

19,92 Ha

DELINEASI	UNIT	PAGU	REALISASI KEUANGAN	
			RP	%
Perencanaan Permukiman Kumuh		Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	100%
Penanganan Permukiman Kumuh	19,92 Ha	Rp 9,174,186,000	Rp 7,339,776,247	80%
Wasdal Permukiman Kumuh		Rp 814,375,000	Rp 456,251,318	56.02%
TOTAL	116	Rp 10,088,561,000	Rp 7,896,027,565	78.27%

*) Data tanggal 31 Desember 2025

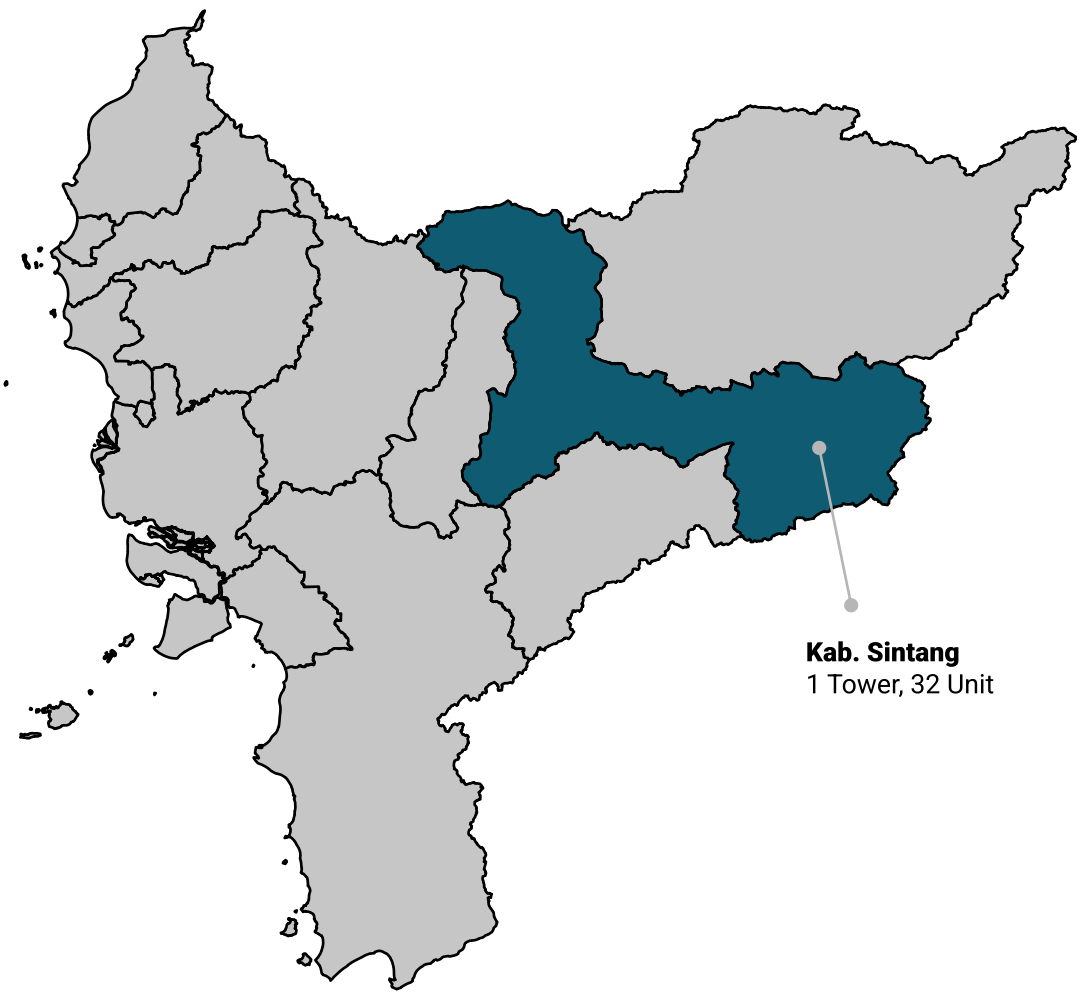


Pada Tahun Anggaran 2025, kegiatan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Provinsi Kalimantan Barat dialokasikan dengan pagu awal sebesar Rp9.174.186.000. Melalui proses pengadaan, harga kontrak hasil tender ditetapkan sebesar Rp7.339.776.247, sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.834.409.753 dibandingkan dengan pagu awal. Selisih tersebut merupakan hasil dari proses tender dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Sampai dengan akhir Desember 2025, realisasi keuangan kegiatan ini telah mencapai 100% dari nilai kontrak, yang dalam konteks pengelolaan anggaran dilakukan melalui pemindahan dana ke rekening penampungan seiring dengan masih berjalannya pelaksanaan pekerjaan. Secara kumulatif, realisasi keuangan tersebut setara dengan sekitar 80% dari pagu awal kegiatan. Adapun realisasi fisik kegiatan tercatat sebesar 75,59%, dan pelaksanaan pekerjaan masih berlanjut sesuai dengan tahapan yang direncanakan.

Sehubungan dengan pelaksanaan fisik yang masih berjalan hingga akhir tahun anggaran, kegiatan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh berpotensi menjadi RPATA, sesuai dengan ketentuan pengelolaan anggaran yang berlaku.

REALISASI PROGRAM RUMAH SUSUN



PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM RUMAH SUSUN

32
Unit

DELINEASI	UNIT	PAGU	REALISASI KEUANGAN	
			RP	%
Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun		Rp 5,794,650,000	Rp 1,053,915,000	18.19%
Wasdal Pembangunan Rumah Susun	1 Tower / 32 Unit	Rp 150,184,000	Rp 78,110,875	52.01%
MK Pembangunan Rumah Susun		Rp 321,600,000	Rp -	0.00%
TOTAL	116	Rp 6,266,434,000	Rp 1,132,025,875	18.06%

*) Data tanggal 31 Desember 2025



Pada Tahun Anggaran 2025, kegiatan Pembangunan Rumah Susun SMA Pancasetya Kalimantan Barat dilaksanakan di Kabupaten Sintang dengan lingkup pembangunan sebanyak 1 tower yang terdiri atas 32 unit. Kegiatan ini ditujukan untuk mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi lingkungan pendidikan, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sarana pendukung permukiman.

Sampai dengan 31 Desember 2025, realisasi keuangan kegiatan pembangunan rumah susun tercatat sebesar Rp 1.132.025.875, atau sekitar 18,06% dari pagu anggaran sebesar Rp 6.266.434.000. Capaian realisasi tersebut berkaitan dengan dimulainya pelaksanaan kontrak pada Bulan Desember 2025, sehingga pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 masih berada pada tahap awal.

Sehubungan dengan waktu mulai kontrak yang berada di akhir tahun anggaran, kegiatan Pembangunan Rumah Susun SMA Pancasetya Kalimantan Barat dilaksanakan sebagai kontrak tahun jamak (Multi Years Contract/MYC). Dengan skema tersebut, pelaksanaan fisik dan penyerapan anggaran akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan tahapan dan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan.



PENUTUP



Pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendukung kebijakan nasional di sektor perumahan. Melalui dukungan berbagai program, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat berupaya memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan selaras dengan ketentuan, tahapan perencanaan, serta kebutuhan masyarakat di daerah.

Ke depan, Satuan Kerja PKP Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi, tata kelola pelaksanaan, dan kualitas dukungan program perumahan dan kawasan permukiman. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pelaksanaan program perumahan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hunian dan lingkungan permukiman di Provinsi Kalimantan Barat.



LAPORAN KINERJA TAHUNAN
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT